



Katalog BPS : 9210.14

PENDAPATAN REGIONAL RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA 2003 - 2007



KERJASAMA
BAPPEDA PROVINSI RIAU
DENGAN
BPS PROVINSI RIAU



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

PENDAPATAN REGIONAL RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA 2003 - 2007

ISSN : 0126-4796
Nomor publikasi : 14.551.2008.18
Katalog BPS Provinsi Riau : 9210.14
Ukuran buku : 21 cm X 28 cm
Jumlah halaman : 54 + ix

Naskah
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Kerjasama dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Riau

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://riau.bps.go.id>



GUBERNUR RIAU

KATA SAMBUTAN

Perencanaan pembangunan sangat terkait dengan berbagai informasi pembangunan. Semakin berkualitas informasi pembangunan tersebut maka semakin berkualitas pula perencanaan pembangunan. Oleh karena informasi pembangunan yang berupa indikator statistik dapat menjadi bahan evaluasi atas pencapaian pembangunan masa lalu sekaligus sebagai bahan dasar penyusunan strategi kebijakan pembangunan di masa datang agar lebih tepat sasaran.

Salah satu informasi statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah adalah statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha yang merupakan informasi atas berbagai sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, konstruksi, perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa-jasa. Dengan tersedianya statistik PDRB menurut Lapangan Usaha ini akan dapat dihasilkan berbagai informasi pembangunan ekonomi mulai dari total nilai perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan tingkat pendapatan masyarakat, yang kesemuanya sangat berguna dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Berkaitan dengan itu, saya menghimbau para pemangku kebijakan di Provinsi Riau untuk dapat memanfaatkan informasi statistik ini sesuai dengan kebutuhannya.

Akhirnya kepada semua pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, saya berharap agar terus partisipasi dalam upaya untuk mewujudkan penyajian indikator statistik ini agar semakin berkualitas di masa yang akan datang.

Pekanbaru, Agustus 2008

GUBERNUR RIAU

Drs. H. WAN ABU BAKAR, MM



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KATA SAMBUTAN

Informasi statistik daerah yang berkualitas sangat dibutuhkan khususnya oleh para perencana pembangunan dalam rangka untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan daerah dan untuk merencanakan arah pembangunan daerah di masa datang. Harapannya bahwa dengan semakin beragamnya informasi statistik di Provinsi Riau yang dimiliki oleh para perencana pembangunan maka akan membuka wawasan yang lebih luas atas pilihan-pilihan perencanaan dalam mengelola sumber daya yang tersedia di Provinsi Riau.

Kami menyambut baik atas terbitnya publikasi *Pendapatan Regional Riau menurut Lapangan Usaha tahun 2003-2007* yang dapat menggambarkan perkembangan dan corak pembangunan ekonomi Provinsi Riau secara sektoral mulai dari sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri hingga sektor jasa-jasa.

Selain itu, publikasi ini menginformasikan pula tentang perkembangan pendapatan masyarakat dan tingkat inflasi seluruh sektor ekonomi. Kesemua informasi statistik tersebut sangat berguna khususnya bagi para perencana pembangunan ekonomi di daerah. Publikasi ini disusun atas kerjasama Bappeda Provinsi Riau dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.

Kepada BPS Provinsi Riau beserta jajarannya, yang telah mewujudkan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih, dan berharap untuk terus meningkatkan kualitas penyajian di masa mendatang.

Pekanbaru, Agustus 2008

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI RIAU**
Kepala,

Drs. EMRIZAL PAKIS, MM
Pembina Utama Muda NIP: 420005126



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS) akan selalu berupaya untuk dapat menyajikan informasi statistik yang berkualitas agar fenomena ekonomi yang terjadi pada tingkat regional dapat direkam dan disusun dalam indikator statistik yang baik. Melalui indikator statistik tersebut akan memudahkan penggambaran atas perkembangan ekonomi dan pergeseran struktur ekonomi yang terjadi.

Oleh karenanya, BPS merasa dibantu untuk secara periodik dapat menyajikan publikasi Pendapatan Regional Riau menurut Lapangan Usaha tahun 2003–2007, yang menyajikan semua sektor ekonomi mulai dari sektor pertanian sampai sektor jasa-jasa, dan merupakan hasil kerjasama antara BPS Provinsi Riau dengan Bappeda Provinsi Riau.

Untuk memudahkan pengguna publikasi ini, disajikan tabel-tabel nominal dan juga tabel-tabel turunannya seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan indeks harga implisit yang mengisyaratkan perkembangan harga masing-masing sektor secara lebih luas. Selain itu, disertakan pula penjelasan konsep, definisi, metodologi dan cara penghitungannya.

Mengingat masih belum sempurnanya publikasi ini, saya mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk perbaikannya, dan sekaligus mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat terbit. Semoga penerbitan publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna data.

Pekanbaru, Agustus 2008
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
K e p a l a ,

IRLAN INDROCAHYO, SE, M.Si
NIP : 340005386

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN GUBERNUR RIAU	i
KATA SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI RIAU	ii
KATA PENGANTAR KEPALA BPS PROVINSI RIAU	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL ANALISIS	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum	1
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	5
1.3. Konsep dan Definisi	6
1.4. Cara Penyajian dan Angka Indeks	6
1.5. PDRB Atas Dasar Harga Konstan	8
BAB II. URAIAN SEKTORAL	10
2.1. Sektor Pertanian	10
2.2. Sektor Pertambangan dan Pengalihan	12
2.3. Sektor Industri Pengolahan	13
2.4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih	15
2.5. Sektor Bangunan	16
2.6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16
2.7. Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi	17
2.8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	20
2.9. Sektor Jasa-jasa	21
BAB III PERKEMBANGAN PDRB SEKTORAL	23
3.1. PDRB Tanpa Migas	24
3.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	24
3.1.2. Kontribusi Sektoral	28
3.1.3. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita	30

	Halaman
3.2. PDRB Dengan Migas	31
3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	31
3.2.2. Kontribusi Sektoral	32
3.2.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita	35
BAB IV PERKEMBANGAN PDRB ANTAR DAERAH	36
PERKEMBANGAN PDRB SE-SUMATERA.....	36
4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	36
4.2. Kontribusi PDRB	37
4.3. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita	38
LAMPIRAN TABEL-TABEL POKOK	

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR TABEL ANALISIS

Tabel	Halaman
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan 2000, 2003 - 2007 (%)	28
3.1.2. Distribusi PDRB Riau Tanpa Migas atas Dasar Harga Berlaku, 2003 - 2007 (%)	29
3.1.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau Tanpa Migas, 2003 - 2007 (Juta Rp)	30
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau Dengan Migas atas Dasar Harga Konstan 2000, 2003 - 2007 (%)	31
3.2.2. Distribusi PDRB Riau Dengan Migas atas Dasar Harga Berlaku, 2003 - 2007 (%) ..	33
3.2.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau Dengan Migas, 2003 - 2007 (Juta Rp)	35
4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga Konstan 2000, 2003 - 2007 (%)	36
4.1.2. Distribusi PDRB Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga Berlaku, 2003 - 2007 (%)	38
4.1.3. PDRB Per Kapita Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera, 2003 - 2007 (Juta Rp)	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
3.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau, 2003 – 2007 (%)	32
3.2. Distribusi Persentase PDRB Riau atas Dasar Harga Berlaku, 2007	33

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2003-2007 (Juta Rupiah)	40
2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2003-2007 (Juta Rupiah)	41
3. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Termasuk Migas Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2003-2007	42
4. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Termasuk Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2003-2007	43
5. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2003-2007	44
6. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2003-2007	45
7. Indeks perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2003-2007	46
8. Indeks perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2003-2007	47
9. Indeks berantai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2003-2007	48
10. Indeks berantai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2003-2007	49
11. Indeks implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau menurut Lapangan Usaha, 2003-2007	50
12. Pendapatan Regional Termasuk Migas dan Angka Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2003-2007	51
13. Pendapatan Regional Termasuk Migas dan Angka Per Kapita Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2003-2007	52
14. Pendapatan Regional Tanpa Migas dan Angka Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2003-2007	53
15. Pendapatan Regional Tanpa Migas dan Angka Per Kapita Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2003-2007	54

1

Pendahuluan

<http://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENJELASAN UMUM

Tujuan dan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejalan dengan hal tersebut, maka prioritas pembangunan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pertumbuhan (*growth*) saja, melainkan juga perubahan pada tatanan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan tatanan sosial ekonomi yang dimaksud seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus, peningkatan kesempatan kerja, dan perubahan pola konsumsi serta distribusi pendapatan.

Perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu, secara langsung atau tidak langsung telah banyak membawa dampak perubahan pada sektor ekonomi, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Peristiwa krisis moneter dan ekonomi di tahun 1997-1998 serta sejak pelaksanaan otonomisasi daerah tahun 1999, telah banyak memberi dampak kepada perubahan dan kemajuan di daerah khususnya Provinsi Riau. Untuk memantau dan mengukur perkembangan ekonomi daerah tersebut, tentu memerlukan beragam informasi

statistik yang akurat dan bermanfaat bagi pembuat keputusan (*decision maker*), baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, sehingga arah pembangunan daerah ke depan dapat diikuti dan dicermati dengan seksama. Oleh karenanya, sejak tahun 2005, BPS Provinsi Riau telah melakukan perubahan tahun dasar, dari semula tahun 1993 menjadi tahun 2000, untuk penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.

Beberapa alasan untuk melakukan perubahan ke tahun dasar baru karena:

- a) Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1993 menjadi makin tidak realistis karena perubahan struktur ekonomi yang relatif cepat. Perkembangan ekonomi nasional, regional, dan lokal dewasa ini makin bergeser ke sektor-sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi.
- b) Struktur ekonomi tahun 1993 belum tersentuh dampak deregulasi, debirokratisasi, dan otonomi daerah.
- c) Menurut rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana teruang dalam buku panduan yang baru "Sistem Neraca Nasional", dinyatakan bahwa penghitungan PDB/PDRB atas

dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhir 0 dan 5. Hal ini juga sudah didukung oleh komitmen para pimpinan BPS se-negara Asean untuk menetapkan tahun 2000 sebagai tahun dasar baru. Sehingga, berbagai alasan diatas mengarah kepada kesimpulan untuk mema-kai tahun dasar 2000 sebagai tahun dasar yang baru.

- d) Karena cakupan terus disempurnakan, dalam jangka waktu tujuh tahun telah terjadi perubahan struktur ekonomi dan ditambah dengan berbagai jenis komoditas baru serta kombinasi harga yang sangat signifikan. Per-baik-an cakupan terutama di sektor pertanian. Perubahan proses komoditas umumnya terjadi di sektor industri pengolahan (elektronik/teknologi informatika). Di sisi lain juga terjadi perubahan dalam komposisi harga antara sektor primer, sekunder, dan tersier.
- e) Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh globalisasi tentunya juga akan berpengaruh kepada perekonomian domestik. Masih dalam periode tersebut, pada pertengahan tahun 1997 hadirnya krisis ekonomi juga berdampak kepada perubahan struktur perekonomian

Indonesia. Secara ringkas, bisa dinyatakan bahwa struktur ekonomi tahun 2000 telah sangat berbeda dengan tahun 1993.

Dengan perekonomian Provinsi Riau yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, telah membawa dampak positif atas perkembangan kebutuhan barang dan jasa dan juga perkembangan ekonomi kewilayahan yang turut mengalami perubahan struktur ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi yang baru, banyak bermunculan disamping, komoditas yang lama tetapi dengan teknologi baru, seperti budidaya burung walet, produk telepon seluler, TV layar datar, dan sebagainya. Dengan demikian, angka penghitungan PDRB Riau dengan tahun dasar baru ini menjadi penting agar bisa menyajikan perkembangan ekonomi terkini dan lebih cermat.

Disamping itu, era otonomi daerah telah banyak memberikan perubahan bagi setiap komponen lembaga Pemerintah Daerah untuk melakukan secara mandiri penataan manajemen pembangunan secara lebih terarah dan terpadu sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Berbagai tingkat kinerja aktivitas pembangunan daerah di Provinsi Riau, baik yang telah maupun yang sedang dilaksanakan, disepakati untuk dapat terus dipantau dan dievaluasi dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Riau 2020.

Untuk mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Riau tersebut salah satu kebutuhan informasi yang diperlukan adalah tentang informasi statistik, khususnya informasi perekonomian makro Provinsi Riau. Untuk keperluan itu, BPS Provinsi Riau telah berupaya melakukan penghitungan PDRB secara berkala. Melalui informasi PDRB ini, diharapkan dapat diketahui kondisi ekonomi makro Provinsi Riau, karena pada dasarnya PDRB merupakan realisasi jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di provinsi ini atas potensi sumber daya yang tersedia.

Penyajian angka PDRB biasanya dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang konstan pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (*base year*) yakni tahun 2000.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Penyusunan publikasi *Pendapatan Regional Riau menurut Lapangan Usaha, 2002-2006*, tetap mengacu kepada konsep, definisi, metodologi, cakupan, dan sumber data secara nasional. Beberapa alasan yang melatarbelakanginya adalah untuk menjaga kelayakan dan konsistensi hasil penghitungan baik antarprovinsi maupun dengan nasional.

Untuk menghitung angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian, Perternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air
5. Bangunan/Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
7. Angkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Sewa Bangunan, dan Jasa Perusahaan.
9. Jasa-jasa.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua komponen tersebut dijumlahkan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu:

1. Pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung;
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah;
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto;
4. Perubahan stok; dan
5. Ekspor neto yang dihitung dari ekspor dikurangi impor.

Dari ketiga pendekatan penghitungan tersebut, secara konsep seyogyanya jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan

untuk faktor-faktor produksinya. PDRB yang telah diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

Pada publikasi ini angka PDRB yang di-tampilkan adalah PDRB yang memakai pendekatan produksi. Di samping itu, beberapa indikator ekonomi penting lainnya dari angka PDRB dapat pula diturunkan, seperti:

- 1. Produk Regional Bruto**, yaitu PDRB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk suatu wilayah yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di suatu wilayah.
- 2. Produk Regional Neto atas dasar harga pasar**, yaitu PDRB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun.
- 3. Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor produksi**, yaitu Produk Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan Pajak Tidak Langsung Neto. Pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, Produk Regional atas dasar harga faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Regional.

4. Angka-angka per Kapita, merupakan ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah.

1. Angka Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula, dan begitu juga sebaliknya.

2. PDRN atas dasar harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu wilayah.

3. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

4. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peran setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

5. PDRB atas dasar harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar wilayah/negeri (yang dipublikasikan pada penerbitan lain).

6. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peran lembaga dalam penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (yang dipublikasikan pada penerbitan lain).

7. PDRB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar wilayah/negeri (yang dipublikasikan pada penerbitan lain).

8. PDRB dan PDRN atas dasar biaya faktor produksi per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan

PDRN setiap kepala atau per satu orang penduduk.

9. PDRB dan PDRN atas dasar biaya faktor produksi per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3 KONSEP DAN DEFINISI

Berikut ini dijelaskan istilah yang berhubungan dengan PDRB antara lain: output, biaya antara dan nilai tambah bruto. Kejelasan pengertian dari tiga istilah tersebut sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB. Selain hal tersebut, pada bab ini juga dijelaskan mengenai pendekatan penghitungan PDRB.

1.3.1 OUTPUT

Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Pada dasarnya nilai output diperoleh dari hasil perkalian antara kuantum produksi dan harganya.

1.3.2 BIAYA ANTARA

Biaya antara terdiri dari biaya yang dipakai habis untuk proses produksi (*intermediate input*). Biaya-biaya ini merupakan biaya untuk barang tidak tahan lama dan jasa yang habis digunakan di dalam proses produksi oleh unit-unit produksi domestik

dalam rentang waktu tertentu biasanya satu tahun.

1.3.3 NILAI TAMBAH BRUTO

Nilai Tambah Bruto merupakan selisih antara output dengan biaya antaranya atau apabila dirumuskan menjadi: Nilai Tambah Bruto = Output - Biaya Antara. Pengertian konsep nilai tambah bruto sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB, yang tidak lain merupakan penjumlahan seluruh besaran nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi pada wilayah tertentu dan dalam rentang waktu tertentu.

1.4 CARA PENYAJIAN DAN ANGKA INDEKS

PDRB, seperti yang telah diuraikan, secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar tertentu. Kedua bentuk penyajian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran produk domestik regional bruto.

b. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar, dan dalam publikasi ini harga konstan didasarkan kepada harga pada tahun 2000. Karena menggunakan harga tetap, perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata di sebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

PDRB juga disajikan dalam bentuk peranan sektoral dan angka-angka indeks, yaitu: indeks perkembangan; indeks berantai; dan indeks harga implisit yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- **Peran Sektoral** diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB masing-masing sektor dengan nilai total seluruh sektor PDRB dikalikan 100 pada tahun yang bersangkutan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. Dalam penyajiannya, peranan sektor diberi judul tabel: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto.
- **Indeks Perkembangan** diperoleh dengan membagi nilai PDRB pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat dari tahun ke tahun terhadap tahun dasar.

- **Indeks Berantai** diperoleh dengan membagi nilai PDRB pada masing-masing tahun dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Apabila angka ini dikali dengan 100 dan hasilnya dikurangi 100, maka angka ini menunjukkan tingkat atau laju pertumbuhan agregat produksi untuk masing-masing tahun. Metode penghitungan ini dapat pula digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan sektoral.
- **Indeks Harga Implisit** diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahun yang sama dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks harga implisit ini dihitung indeks berantainya dengan rumus indeks berantai, akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun sebelumnya. Indeks ini secara berkala juga dapat menunjukkan besaran inflasi yang mencakup seluruh barang dan jasa yang diproduksi di wilayah penghitungan PDRB.

1.5 PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN

Pendapatan regional atas dasar harga konstan 2000 sangat penting untuk melihat

perkembangan riil dari tahun ke tahun bagi setiap agregat ekonomi yang diamati. Agregat yang dimaksud tersebut dapat merupakan PDRB secara keseluruhan, nilai tambah sektoral (PDRB sektoral) ataupun komponen penggunaan PDRB. Pada dasarnya dikenal empat cara untuk memperoleh nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan. Masing-masing cara tersebut diuraikan berikut ini.

1.5.1 Revaluasi

Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar 2000, dan hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya, nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil penghitungan di atas.

Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya yang digunakan karena mencakup komponen yang terlalu banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan 2000 biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan 2000 masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

1.5.2 Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan atau indeks dari berbagai indikator produksi, seperti: Jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap penghitungan output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan ratio tetap nilai tambah atas dasar harga konstan yang sama. Ratio tersebut diperoleh dari survei khusus (SKPR) dan Tabel Input-Output Riau 2001.

1.5.3 Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

1.5.4 Deflasi Berganda

Dalam metode deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya; selanjutnya nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya

antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan Indeks Harga Produksi atau Indeks Harga Perdagangan Besar sesuai dengan cakupan komoditasnya

Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan 2000, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

<http://riau.bps.go.id>

2

Uraian Sektoral

<http://www.bps.go.id>

BAB II

URAIAN SEKTORAL

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan subsektor, cara-cara penghitungan nilai tambah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, serta sumber data yang digunakan.

2.1 SEKTOR PERTANIAN

2.1.1 Ruang Lingkup

Sektor pertanian mencakup segala perusahaan yang didapat dari alam dan merupakan benda atau barang biologis (hidup). Termasuk dalam kegiatan ini:

Subsektor Tanaman Bahan Makanan

Yaitu meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela rambat, ketela pohon, umbi-umbian, kacang tanah, kacang kedelai, kacang-kacangan lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian dan tanaman bahan makanan lainnya.

Subsektor Tanaman Perkebunan

Yaitu meliputi semua jenis kegiatan tanaman perkebunan, baik yang diusahakan

rakyat maupun yang diusahakan perusahaan perkebunan. Adapun komoditas yang dihasilkan seperti: cengkeh, jahe, jambu mete, jarak, kakao, karet, kapas, kapok, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kemiri, kina, kopi, lada, pala, panili, serat karung, tebu, tembakau, teh, serta tanaman perkebunan lainnya.

Subsektor Peternakan

Yaitu meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Komoditas hasil peternakan antara lain: sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, itik, telur ayam, telur itik, susu sapi, sarang burung walet serta hewan peliharaan lainnya.

Subsektor Kehutanan

Yaitu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran. Termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditas hasil kehutanan di antaranya adalah kayu gelondongan, baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya, kayu bakar, rotan, arang, bambu, kopal, menjangan, babi

hutan, dan hasil hutan lainnya seperti madu lebah hutan, sarang burung walet hutan.

Subsektor Perikanan

Yaitu meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin. Komoditas perikanan antara lain seperti ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya, ikan mas dan jenis ikan darat lainnya, ikan bandeng dan jenis ikan air payau lainnya, udang dan binatang berkulit keras lainnya, cumi-cumi dan binatang lunak lainnya, rumput laut serta tumbuhan laut lainnya.

2.1.2 Metode Estimasi

Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan dari sudut produksi. Secara umum, nilai output diperoleh dari hasil perkalian antara seluruh produksi yang dihasilkan terhadap harga produsennya.

NTB suatu subsektor diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap komoditas. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas dasar harga produsen terhadap seluruh biaya antara, yang dalam prakteknya biasa juga dihitung melalui perkalian antara rasio NTB terhadap output komoditas tertentu. Untuk keperluan penyajian data NTB atas dasar harga konstan 2000, digunakan metode revaluasi, yaitu suatu metode yang menilai seluruh faktor produksi dan

biaya-biaya antara berdasarkan harga tahun 2000.

Khusus untuk subsektor peternakan, penghitungan produksi tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus diperoleh melalui suatu rumus persamaan yang menggunakan tiga peubah, yakni: banyaknya ternak yang dipotong ditambah selisih populasi ternak dan selisih antara ekspor dan impor ternak.

2.1.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penyusunan output dan NTB sektor pertanian adalah data produksi, harga, dan rasio NTB.

Data produksi Tanaman Bahan Makanan bersumber dari BPS dan Dinas Tanaman Pangan, data perkebunan dari Dinas Perkebunan, data peternakan dari BPS dan Dinas Peternakan, data kehutanan dari Dinas Kehutanan, dan data perikanan bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

Data harga untuk tiap-tiap komoditas selain bersumber dari BPS Provinsi Riau, juga diperoleh dari dinas-dinas terkait.

Rasio NTB terhadap output didasarkan pada hasil yang disajikan dalam Publikasi Tabel Input-Output Provinsi Riau 2001.

2.2 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Sektor ini mencakup kegiatan penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas, yang dilakukan di bawah tanah maupun di atas permukaan bumi. Sifat dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut. Kegiatan lain yang termasuk dalam sektor ini adalah pembuatan garam kasar dengan cara menguapkan air laut.

2.2.1 Ruang Lingkup

Seluruh jenis komoditas yang dicakup dikelompokkan ke dalam tiga subsektor, yaitu: pertambangan migas, pertambangan tanpa migas dan penggalian.

Subsektor Minyak dan Gas Bumi

Meliputi kegiatan pencarian kandungan minyak dan gas bumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan untuk dapat dijual atau dipasarkan. Kegiatan ini menghasilkan minyak bumi, kondensat dan gas bumi. Pada penghitungan seris 2000,

cakupan komoditas subsektor ini bertambah dengan adanya uap panas bumi.

Subsektor Pertambangan Non Migas

Meliputi pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan benda padat, baik di bawah maupun di atas permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Hasil kegiatan ini berwujud batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, fero nikel, nikel mattes, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas dan perak, bijih mangan, belerang, yodium, fosfat, aspal alam, serta komoditas lainnya.

Subsektor Penggalian

Mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian yang umumnya berada di permukaan bumi. Hasil kegiatan ini berupa batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, koalin, tanah liat dan sebagainya.

2.2.2 Metode Estimasi

Untuk memperoleh estimasi output dan nilai tambah atas dasar harga berlaku, dilakukan perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan

mengalikan output tersebut dengan rasio NTB terhadap output di masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan di masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2000. Lalu, melalui perkalian antara output tersebut dengan rasio NTB terhadap output tahun 2000 diperoleh NTB atas dasar harga konstan 2000.

2.2.3 Sumber Data

Data yang diperlukan untuk penghitungan sektor ini adalah data produksi diperoleh dari BPS, perusahaan pertambangan/penggalian dan Dinas Pertambangan. Data harga diperoleh dari BPS dan perusahaan penggalian. Rasio NTB terhadap output diperoleh dari Publikasi Tabel Input-Output Indonesia 2000 dan Tabel Input-Output Provinsi Riau 2001.

2.3 SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Kegiatan sektor industri pengolahan mencakup 3 (tiga) subsektor yaitu:

- a) Industri pengilangan minyak bumi,
- b) Industri pengolahan non-migas, dan
- c) Industri pengilangan gas alam cair (LNG)

Untuk industri non-migas dirinci lagi menjadi industri non-migas besar/sedang,

non-migas kecil, dan kerajinan rumah tangga.

2.3.1 Ruang Lingkup

Industri Pengilangan Minyak Bumi

Penyajian subsektor ini tidak berbeda sama sekali antara seri lama dengan seri baru.

Industri Non-migas Besar/Sedang

Dalam penghitungan seri baru ini (2000=100) dengan seri lama (1993=100) tetap mengacu kepada pembagian kelompok subsektor Industri Besar Sedang (IBS) pada KLUI 2 dijit yakni menjadi 9 (sembilan) kelompok, seperti:

31. Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
32. Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit;
33. Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumahtangga;
34. Industri Kertas dan Barang-barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
35. Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik;
36. Industri Barang-barang Galian Bukan Logam, kecuali Minyak Bumi dan Batu Bara.
37. Industri Logam Dasar.
38. Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya.
39. Industri Pengolahan lainnya.

Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

Subsektor ini sama dengan cakupan dan definisi kegiatan Industri Besar/Sedang Non-migas. Perbedaannya terletak pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan industri tersebut. Perusahaan dikatakan sebagai Industri Kecil jika jumlah tenaga kerjanya antara 5 sampai 19 orang, sedangkan Industri Kerajinan Rumah Tangga jika jumlah tenaga kerjanya kurang dari 5 orang.

Menurut kegiatan utama yang dihasilkan, kegiatan subsektor IKKR dikelompokkan menjadi sembilan kelompok komoditas, yaitu:

31. Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
32. Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit;
33. Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah tangga;
34. Industri Kertas dan Barang-barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
35. Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik;
36. Industri Barang-barang Galian Bukan Logam, kecuali Minyak Bumi dan Batu Bara.
37. Industri Logam Dasar.
38. Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya.
39. Industri Pengolahan lainnya.

Industri Pengilangan Gas Alam Cair (LNG)

Penyajian subsektor ini tidak berbeda sama sekali antara seri lama dengan seri baru, karena disamping komoditasnya tunggal (LNG), produknya juga hanya ada di beberapa tempat yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Kalimantan Timur.

2.3.2 Metode Estimasi

Dalam penghitungan subsektor industri pengolahan non-migas besar/sedang digunakan pendekatan produksi, yaitu output dihitung lebih dahulu. Kemudian, output dikurangi dengan biaya antara menghasilkan nilai tambah bruto. Untuk mendapatkan NTB atas dasar harga konstan dipakai metode deflasi dimana output dan jumlah tenaga kerja digunakan sebagai deflator.

Untuk penghitungan subsektor pengilangan minyak menggunakan pendekatan produksi seperti halnya industri pengolahan non migas, sedangkan untuk harga konstan digunakan cara revaluasi.

Sedangkan untuk subsektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga penghitungan output dan NTBnya menggunakan pendekatan tenaga kerja, yang dihitung secara rinci menurut kegiatan industri yang dikelompokkan dalam 3 digit KLUI. Untuk menghitung NTB atas dasar harga konstan

menggunakan metode deflasi, dan sebagai deflatornya adalah jumlah output dan tenaga kerja.

2.3.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan sektor ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu:

1. Tabel Input-Output Indonesia (BPS)
2. Publikasi Tahunan Statistik Industri Besar/Sedang (BPS)
4. Publikasi Indikator Ekonomi (BPS)
5. Publikasi Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia (BPS)
6. Publikasi Tahunan Pertambangan dan Energi, Deptamben.
7. Publikasi Tahunan Statistik Pertambangan Minyak & Gas Bumi (BPS)

2.4 SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

2.4.1 Ruang Lingkup

Subsektor Listrik

Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) maupun oleh perusahaan Non-PLN, dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan listrik yang dicuri.

Subsektor Air Bersih

Kegiatan subsektor air minum mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah dan swasta. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Perusahaan Air Minum (PAM) maupun bukan PAM.

2.4.2 Metode Estimasi

Metode penghitungan subsektor listrik menggunakan pendekatan produksi. Output dan NTB subsektor ini diperoleh dari penjumlahan output/NTB dari PLN dan Non-PLN.

Untuk penghitungan subsektor air bersih menggunakan pendekatan produksi, dimana output dan NTB atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode revaluasi.

2.4.3 Sumber Data

Data produksi, harga dan biaya antara subsektor listrik untuk PLN diperoleh dari PT. PLN (Persero) Wilayah Riau, sedangkan untuk perusahaan listrik Non-PLN dari Dinas Pertambangan, data sekunder dan SKPR.

Data produksi, harga dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air

minum diperoleh dari hasil survei tahunan Perusahaan Air Minum.

2.5 SEKTOR BANGUNAN

2.5.1 Ruang Lingkup

Pada umumnya kegiatan sektor ini terdiri atas bermacam kegiatan yang meliputi: pembuatan, pembangunan, pemasangan, dan perbaikan berat maupun ringan semua jenis konstruksi yang keseluruhan kegiatan tersebut dapat dirinci menurut standar KLUI.

Sektor bangunan terbagi 5 bagian yaitu: Bangunan Tempat Tinggal dan Bangunan Bukan Tempat Tinggal, Prasarana Pertanian, Jalan-Jembatan-Pelabuhan, Bangunan Instalasi Listrik-Gas-Air Minum dan Komunikasi, serta bangunan lainnya.

2.5.2 Metode Estimasi

Metode penghitungan sektor bangunan menggunakan pendekatan pendapatan untuk NTB atas dasar harga berlaku, dan metode deflasi untuk penghitungan atas dasar harga konstan.

2.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan didapat dari hasil SUSENAS Riau, Publikasi AKI dan Publikasi Non-AKI, serta Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia.

2.6 SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

2.6.1 Ruang Lingkup

Subsektor Perdagangan

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran/pendistribusian tanpa merubah sifat barang tersebut. Dalam penghitungannya kegiatan ini dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan, dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru atau barang bekas.

Subsektor Hotel

Subsektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi di sini adalah hotel berbintang maupun tidak, serta tempat tinggal lainnya yang di-

gunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sebagainya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman, serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap di mana kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan yang datanya sulit dipisahkan.

Subsektor Restoran

Kegiatan subsektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam subsektor ini seperti rumah makan, warung sate, warung kopi, catering, dan kantin.

2.6.2 Metode Estimasi

Penghitungan nilai tambah sub sektor perdagangan menggunakan metode arus barang (*commodity flow*), sedangkan untuk sub sektor hotel menggunakan metode estimasi dengan pendekatan produksi. Dan untuk sub sektor restoran menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jadi di luar rumah.

Untuk penghitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan untuk sektor ini dihitung masing-masing dengan metode revaluasi dan atau deflasi.

2.6.3 Sumber Data

1. Publikasi Susenas dan pola konsumsi Provinsi Riau.
2. Publikasi Direktori Hotel Riau.
3. Publikasi tingkat penghunian kamar malam hotel Riau.
4. Buletin Ekonomi BPS.
5. Data sekunder dan SKPR.

2.7 SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

2.7.1 Ruang Lingkup

Subsektor Pengangkutan

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor pengangkutan terdiri dari atas Jasa Angkutan Jalan Raya, Angkutan Laut, Angkutan Udara, dan Jasa Penunjang Angkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, dan pergudangan.

Angkutan Jalan Raya meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk di sini kegiatan lainnya seperti carter/sewa kendaraan baik dengan

atau tanpa pengemudi. Tidak termasuk kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai satu satuan usaha dengan kegiatan ini seperti jasa bongkar muat, keagenan barang dan penumpang, perbaikan dan pemeliharaan.

Angkutan Laut meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu satuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya, dan disamping itu data yang tersedia juga sulit untuk dipisahkan. Misalnya tangker-tangker yang diusahakan oleh Pertamina untuk angkutan di dalam negeri, kapal milik perusahaan penangkapan ikan dan angkutan khusus lainnya.

Angkutan Udara meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di daerah tersebut. Termasuk disini kegiatan lainnya yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang datanya sulit untuk dipisahkan, seperti EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara) dan lain-lain, baik untuk angkutan penerbangan dalam negeri maupun angkutan penerbangan luar negeri. Tidak termasuk kegiatan penerbangan yang

dilakukan oleh instansi/perkumpulan yang sifatnya tidak terbuka untuk umum.

Jasa Penunjang Angkutan mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat, terminal dan parkir, bongkar muat laut dan darat, keagenan penumpang, ekspedisi laut, jalan tol, dan jasa penunjang lainnya seperti pengerukan dan pengujian kelayakan angkutan laut.

Subsektor Komunikasi

Subsektor ini terdiri dari kegiatan pos dan giro, telekomunikasi, dan jasa penunjang komunikasi. Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh Perum Pos dan Giro. Telekomunikasi meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon, faksimile, dan telex yang diusahakan oleh antara lain PT Telekomunikasi, PT Excelcomindo, dan PT Indosat. Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel), warung internet (warnet), dan telepon seluler (ponsel).

2.7.2 Metode Estimasi

Nilai tambah subsektor angkutan jalan raya atas dasar harga berlaku dengan menggunakan pendekatan produksi yang didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang wajib uji yang diperoleh dari laporan tahunan Dinas Perhubungan, dan hasil SKPR sektor angkutan, serta data sekunder kecamatan.

Penghitungan nilai tambah subsektor angkutan laut dilakukan melalui pendekatan alokasi dari angka nasional subsektor angkutan laut, karena kegiatan angkutan laut merupakan kegiatan multiregional, di mana kegiatannya bisa sekaligus merupakan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal yang diusahakan oleh perusahaan milik nasional, baik yang melakukan trayek dalam negeri maupun internasional.

Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi dengan menggunakan indeks angkutan/transpor. Kemudian, nilai tambah atas dasar harga berlaku subsektor angkutan udara diperoleh dari laporan tahunan tiap bandar udara. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan cara deflasi.

Nilai tambah subsektor jasa penumpang angkutan seperti terminal, parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi,

bongkar-muat, pergudangan diperoleh dari SKPR. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi.

Subsektor komunikasi mencakup jasa pos dan giro, serta telekomunikasi. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku didasarkan pada data produksi dan struktur biaya yang diperoleh dari laporan keuangan PT. POSINDO. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 memakai metode ekstrapolasi dengan menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim.

Penghitungan nilai tambah subsektor telekomunikasi atas dasar harga berlaku berdasarkan data yang bersumber dari laporan keuangan Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Riau. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit percakapan lokal/interlokal.

2.7.3 Sumber Data

1. Dinas Perhubungan Riau.
2. Data SKPR.
3. Data Sekunder.
4. Kandatel Riau Daratan.

2.8 SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya disebut sebagai sektor finansial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan berupa penarikan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Secara garis besar sektor ini terbagi atas 3 kelompok kegiatan utama yaitu: usaha perbankan dan moneter (otoritas moneter), lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, serta usaha persewaan bangunan dan tanah. Namun, dalam klasifikasi tahun dasar 2000 sektor bank dan lembaga keuangan lainnya berubah menjadi Sektor Keuangan, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan.

2.8.1 Ruang Lingkup

Subsektor bank, meliputi Bank Indonesia (BI) dan bank non BI (bank umum pemerintah dan bank umum swasta) dan BPR. Subsektor lembaga keuangan bukan bank mencakup kegiatan asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian dan asuransi lainnya, mencakup juga koperasi, KUD dan Non KUD, pegadaian dan dana pensiun. Kemudian, subsektor jasa penunjang keuangan mencakup pedagang valuta asing, pasar modal dan sebagainya.

2.8.2 Metode Estimasi

Penghitungan nilai tambah subsektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia. Kemudian nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi dengan menggunakan IHK Umum.

Penghitungan nilai tambah asuransi atas dasar harga berlaku diperoleh melalui SKPR dan data sekunder. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara metode deflasi, juga dengan menggunakan IHK Umum.

Penghitungan nilai tambah Koperasi berasal dari data SKPR. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi, dan deflatornya adalah IHK Umum.

Nilai tambah subsektor sewa bangunan baik untuk tempat tinggal dan bukan, diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antaranya. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi, sebagai deflatornya adalah IHK Umum.

Selain subsektor tersebut, subsektor jasa penunjang keuangan, seperti pedagang valas, dihitung dengan cara yang sama seperti subsektor asuransi maupun koperasi.

2.8.3 Sumber Data

1. Publikasi/Laporan Tahunan BI
2. Publikasi IHK
3. Data Sekunder dan SKPR

2.9 JASA - JASA

Sektor ini mencakup subsektor jasa pemerintahan umum dan subsektor jasa swasta. Subsektor pemerintah umum meliputi pemerintahan dan hankam, sedangkan subsektor jasa swasta meliputi subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan, jasa perorangan dan rumah tangga.

2.9.1 Ruang Lingkup

Subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan mencakup jasa pendidikan yang dikelola oleh swasta meliputi TK, SD, SLTP, SLTA dan Universitas/Akademi. Juga termasuk jasa pendidikan keterampilan berbentuk kursus. Jasa kesehatan oleh swasta seperti: rumah sakit, rumah bersalin, dokter dan sebagainya. Kemudian jasa kemasyarakatan lainnya seperti panti asuhan dan panti jompo. Terakhir jasa lainnya, adalah jasa yang tidak termasuk dalam cakupan di atas namun masih tergolong dalam sub-sektor jasa sosial dan kemasyarakatan.

Subsektor jasa hiburan mencakup kegiatan bioskop, panggung kesenian, radio swasta, taman hiburan, dan sebagainya.

Subsektor jasa perorangan dan rumah tangga mencakup kegiatan perbengkelan (mobil, motor, sepeda, alat-alat elektronik), dan jasa perorangan (tukang binatu, salon, tukang semir, tukang jahit dan sebagainya).

2.9.2 Metode Estimasi

Nilai tambah subsektor pemerintahan dan hankam terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencakup upah dan gaji dari belanja rutin dan sebagian dari belanja pembangunan.

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks jumlah pegawai negeri. Penghitungan nilai tambah subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan atas dasar harga berlaku melalui pendekatan produksi, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara/metode ekstrapolasi.

Penghitungan nilai tambah subsektor jasa hiburan dan kebudayaan atas dasar harga berlaku juga melalui pendekatan produksi. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK aneka dan jasa. Kemudian untuk penghitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku subsektor jasa perorangan dan rumah tangga juga melalui pendekatan produksi, sekaligus penghitung-

an nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi.. Sebagai deflatornya adalah IHK aneka dan jasa.

2.9.3 Sumber Data

1. Data belanja pegawai pusat dan ABRI dari BPS.

2. Data belanja Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dari BPS.
3. Data sekunder dan SKPR.
4. Data Podes SP/ST/SE.
5. Publikasi IHK

<http://riau.bps.go.id>

3

Perkembangan PDRB

Sektoral

BAB III

PERKEMBANGAN PDRB RIAU

Peran ekonomi migas pada tingkat nasional memang telah berkurang dan diambil alih oleh peran industri dan pertanian. Namun demikian, perkembangan migas dalam perekonomian sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi provinsi-provinsi penghasil migas. Adanya kenaikan harga minyak dunia memberikan dampak pada kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri seperti terjadi pada akhir tahun 2005. Situasi tersebut sangat dirasakan oleh para pelaku usaha terutama sektor industri.

Hingga tahun 2006, dampak kenaikan BBM masih mempengaruhi setiap aktivitas ekonomi, ini terlihat dari laju pertumbuhan pada tahun 2006 yang mengalami perlambatan yakni sebesar 5,51 persen bila dibanding tahun 2005 yang tumbuh sebesar 5,69 persen.

Situasinya telah berbeda di saat tahun 2007, saat dampak kenaikan BBM sudah mulai sirna oleh karena setiap aktivitas ekonomi secara simultan telah mampu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang semakin kondusif. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2007 sebesar 6,32 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik tersebut karena didukung oleh kondisi makro ekonomi lainnya. Inflasi tahunan tahun 2007 hanya satu digit yakni 7,53 persen, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mengalami penurunan dari 12,75 persen di tahun 2005 menjadi 8,00 persen pada tahun 2007, dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika mengalami penguatan dari Rp 9.830,- di tahun 2005 menjadi Rp 9.419,- pada tahun 2007.

Dampak makro ekonomi yang dirasakan oleh masing-masing provinsi di Indonesia berbeda-beda. Sampai dengan tahun 2007, sebagian besar provinsi telah mampu mengatasi dampak kenaikan BBM, namun ada beberapa provinsi masih terkena imbas kenaikan BBM tersebut. Provinsi Riau mulai tahun 2006 hingga tahun 2007, pasca kenaikan BBM, perkembangan ekonominya mengalami kemajuan. Daya beli masyarakat Riau yang kokoh terutama dari penghasilan di subsektor perkebunan, sangat membantu roda perekonomian di Riau sehingga dapat bertahan dan dengan cepat menyesuaikan kondisi ekonomi yang terjadi. Ini tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa migas Riau

pada tahun 2006 dan tahun 2007 yang senantiasa berada di atas 8 persen sama seperti tingkat pertumbuhan selama tahun 2005.

Sedangkan pertumbuhan dengan migas Riau selama tahun 2005-2007 terus mengalami penurunan produksi sehingga dari laju pertumbuhan 5,41 persen tahun 2005 menjadi sebesar 5,15 persen pada tahun 2006 dan terakhir hanya sebesar 3,41 persen selama tahun 2007.

Gambaran umum perekonomian Riau khusus di tahun 2007 sebagai berikut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan tanpa migas, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor bangunan, sektor industri pengolahan tanpa migas, dan sektor jasa-jasa. Sementara itu sub sektor minyak dan gas mengalami perlambatan pertumbuhan. Perlambatan ini sangat mempengaruhi pembentukan PDRB, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan PDRB dengan migas pada tahun 2007 menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Perkembangan aktivitas ekonomi Riau selanjutnya akan dianalisis secara lebih rinci dan terpisah antara PDRB tanpa migas dan PDRB dengan migas. Dari gambaran secara terpisah ini, dapat diketahui perkembangan perekonomian serta peran

masing-masing sektor terhadap perekonomian Riau baik dengan migas maupun tanpa migas.

3.1 PDRB Riau Tanpa Migas

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir dalam kurun waktu tahun 2003-2007, laju pertumbuhan ekonomi Riau berjalan stabil dalam berkisar di atas delapan persen. Berdasarkan angka penghitungan PDRB Riau tercatat kondisi pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir yakni di tahun 2005 sebesar 8,54 persen, tahun 2006 sebesar 8,66 persen dan tahun 2007 sebesar 8,25 persen.

Secara sektoral, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan non migas terutama karena tingginya kontribusi produksi batu bara. Pertumbuhan sektor pertambangan pada tahun 2005 sebesar 27,24 persen, tahun 2006 sempat mencapai 28,61 persen dan saat ini pada tahun 2007 tumbuh sebesar 24,57 persen.

Karena kegiatan eksploitasi pertambangan batu bara baru berjalan sekitar lima tahun terakhir, untuk itu kemandiriannya masih perlu terus dibina oleh para pemangku kebijakan. Faktor utama kemandiriannya sangat tergantung pada cadangan potensial batu baru yang tersedia

untuk dieksploitasi. Bila di Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu memiliki cadangan potensial yang melimpah maka diharapkan di masa depan dapat diprediksi akan menjadi salah satu komoditas primadona Riau selain minyak bumi.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi kedua terjadi di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh perkembangan aktivitas subsektor bank yang meningkat tajam. Pertumbuhan ekonomi subsektor bank tahun 2007 sangat tinggi hingga mencapai 21,14 persen, walaupun sedikit melambat dibanding tahun yang lalu sebesar 36,25 persen.

Pada tahun 2007 pihak perbankan semakin yakin menyalurkan pemberian kredit kepada masyarakat dan sektor riil, hal ini oleh karena didukung kondisi yang terjadi dilapangan yakni semakin rendahnya tingkat kredit macet meskipun semakin beragamnya kredit (terutama kredit konsumsi). Ini membuktikan tingginya kemampuan konsumen mengimbangi tingkat suku bunga kredit.

Selain itu, tingginya pertumbuhan juga ditandai oleh perkembangan perbankan yang jumlahnya semakin tersebar sampai tingkat pedesaan sehingga telah memberikan kemudahan akses masyarakat untuk

menggunakan jasa bank, serta diiringi dengan kemudahan persyaratan permintaan kredit sehingga menjadi alasan yang kuat bagi konsumen untuk menggunakan jasa perbankan dibandingkan dengan jasa peminjaman lainnya. Inilah yang menjadi daya tarik para pebisnis swasta maupun masyarakat untuk memperlancar dan mendorong kinerja wirausaha yang dilakukannya.

Selain kedua sektor di atas, pada tahun 2007 ini ada beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi, yakni tumbuh di atas 9 persen. Adapun sektor-sektor tersebut adalah sektor bangunan, sektor industri dan sektor jasa-jasa. Masing masing tumbuh sebesar 11,65 persen, 11,41 persen dan 9,71 persen.

Sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang pesat baik untuk infrastruktur maupun bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Diantara realitas yang tampak adalah telah terwujudnya gedung perkantoran pemerintah menuju satu atap guna memenuhi pelayanan prima. telah tersedia. Demikian juga telah terealiasinya prasarana penunjang program K2I berupa bangunan perpustakaan yang representatif. Selain itu, tingkat intensitas penyelesaian proyek multiyears di berbagai sektor terlihat jelas semakin dipacu.

Kemudian pembangunan gedung perkantoran, jalan, jembatan, pelabuhan dan infrastruktur lainnya baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta seperti sarana bisnis berupa pusat perbelanjaan (*mall*), ruko, perhotelan, dan bangunan untuk tempat tinggal perorangan dan melalui developer ikut pula mendorong pesatnya pertumbuhan pada sektor ini. Melalui jasa berbagai pengembang, animo masyarakat masih tetap tinggi untuk memiliki rumah tempat tinggal baik melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi segmen masyarakat menengah ke bawah maupun cukup menjamurnya perumahan mewah real estate yang telah laris dipasarkan di beberapa segmen daerah perkotaan.

Berikutnya laju pertumbuhan sektor industri tanpa migas tercatat sebesar 11,41 persen. Pertumbuhan ini karena lebih dipacu oleh meningkatnya subsektor industri makanan, minuman dan tembakau, serta subsektor industri kertas dan barang cetakan. Permintaan atas CPO di pasar dunia telah memicu pertumbuhan subsektor industri makanan, minuman dan tembakau. Disamping itu, daya beli masyarakat Riau yang cukup besar telah ikut pula menjadi pemicu penciptaan berbagai jenis produk dari industri makanan dan minuman di Riau. Sementara, itu masih perkembangan

produksi kertas dan bubur kertas dari Riau dipacu oleh masih besarnya permintaan pasar dunia terhadap komoditas ini.

Selanjutnya pertumbuhan di sektor jasa-jasa pada tahun 2007 mencapai sebesar 9,71 persen. Sektor ini utamanya didorong oleh pertumbuhan jasa pemerintahan sebesar 9,39 persen dan jasa swasta sebesar 10,77 persen. Peningkatan jumlah Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar secara tidak langsung meningkatkan anggaran belanja barang pemerintah. Selain itu, pemberian tambahan tunjangan untuk pegawai pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten signifikan meningkatkan nilai tambah sub sektor jasa pemerintahan. Sementara pertumbuhan subsektor jasa swasta disebabkan oleh peningkatan komoditas jasa sosial kemasyarakatan sebesar 9,20 persen, jasa hiburan dan rekreasi sebesar 10,60 persen, dan jasa perseorangan dan rumah tangga sebesar 10,95 persen.

Kemudian selama tahun 2007 terdapat sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi namun masih di bawah 9 persen, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan telekomunikasi.

Perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang cukup tinggi terutama karena maraknya transaksi jual beli

barang dan jasa khususnya barang-barang tahan lama (*durable goods*), seperti barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor yang masuk ke Riau yang cukup besar sehingga memacu naiknya transaksi perdagangan. Sementara, tumbuhnya hotel dan penginapan baru mempunyai pengaruh positif terhadap penciptaan nilai tambah subsektor hotel. Semakin maraknya berbagai jenis makanan dan dengan adanya peningkatan daya beli sebagian masyarakat telah turut memacu peningkatan subsektor restoran.

Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 7,28 persen. Program peningkatan infrastruktur, khusus akses transportasi darat antar kab/kota, antar kecamatan dan antardesa masih harus terus ditingkatkan baik segi kuantitas maupun kualitas dari akses yang telah ada guna memacu pertumbuhan subsektor angkutan darat. Kemudian kondisi ekonomi dan keamanan daerah Riau yang kondusif serta semakin membaiknya pelayanan, prasarana dan sarana angkutan udara menjadi pendorong tingkat pertumbuhan pertumbuhan di sektor ini. Masuknya beberapa armada pesawat terbang baru dan penambahan jalur penerbangan yang didukung oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan udara baik oleh swasta maupun pemerintahan dalam

memperlancar aktivitas ekonominya telah mendorong peningkatan nilai tambah subsektor angkutan udara.

Sementara itu, peningkatan penggunaan telepon selular menjadi pilihan yang lebih menarik dan *trendy* untuk melakukan komunikasi, dengan demikian membuat jumlah pelanggan terus bertambah. Persaingan harga melalui berbagai jenis kartu yang ditawarkan oleh para *provider* menyebabkan harga pulsa menjadi murah sehingga konsumen pengguna telepon seluler semakin banyak memakai pulsa dalam berkomunikasi.

Selanjutnya sektor listrik dan air pada tahun 2007 ini tumbuh sebesar 5,62 persen dan tahun 2006 tumbuh sebesar 5,86 persen. Semakin meningkatnya perekonomian suatu daerah akan mendorong tingkat kebutuhan masyarakat dan dunia usaha akan energi listrik dan air. Tuntutan kebutuhan tersebut belum terpenuhi oleh sektor ini oleh karena keterbatasan daya yang dihasilkan. Bahkan pertumbuhan sektor ini semakin lama akan cenderung menurun apabila tidak disertai investasi pembangunan pembangkit listrik. Karena kapasitas yang ada saat ini sudah maksimal. Untuk itu dimasa mendatang sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat dalam mengatasi krisis energi ini

Tabel 3.1.1
 Pertumbuhan Ekonomi Riau Tanpa Migas
 atas Dasar Harga Konstan 2000, 2003-2007
 (%)

Sektor	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	6,32	7,00	6,77	5,97	4,84
2. Pertambangan	19,63	34,07	27,24	28,61	24,57
3. Industri	9,89	10,14	9,08	9,11	11,41
4. Listrik dan air	3,10	10,44	9,20	5,86	5,62
5. Bangunan	6,34	9,10	7,15	8,27	11,65
6. Perdagangan	10,81	9,37	10,15	11,29	8,94
7. Angkutan	11,20	11,85	10,46	9,62	7,28
8. Keuangan	12,86	18,92	18,18	15,67	13,33
9. Jasa-Jasa	6,87	9,06	7,92	9,94	9,71
Total PDRB	8,17	9,01	8,54	8,66	8,25

Sumber: BPS Provinsi Riau

Terakhir adalah sektor pertanian, sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan paling kecil yaitu 4,84 persen selama tahun 2007. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perlambatan dari subsektor perkebunan dan kehutanan. Meskipun tingkat pertumbuhan subsektor kehutanan selama tahun 2007 masih tergolong tinggi namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perlambatan. Melambatnya pertumbuhan pada subsektor perkebunan karena rendahnya tingkat produksi akibat dari kebakaran lahan yang tidak terkendali. Pada tahun 2007 ini subsektor perkebunan tumbuh sebesar 7,04 persen. Kemudian melambatnya subsektor kehutanan akibat

adanya peraturan *illegal logging* dan kapasitas hutan yang tersedia sudah sangat menipis merupakan penyebab utama rendahnya pertumbuhan di sektor ini, subsektor kehutanan hanya tumbuh sebesar 2,21 persen. Rendahnya pertumbuhan di subsektor kehutanan hendaknya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau, program revitalisasi kehutanan hendaknya semakin gencar dicanangkan dan menjadi salah satu agenda utama.

3.1.2 Kontribusi Sektoral

Struktur ekonomi Riau secara sektoral menggambarkan kontribusi atau peran setiap sektor ekonomi terhadap total perekonomian di Riau. Melalui kontribusi ini maka kita dapat mengukur seberapa besar kemampuan daya ungkit (*leverage*) dari setiap sektor ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian.

Pada Tabel 3.1.2 tampak bahwa struktur ekonomi tanpa migas Riau pada tahun 2007 masih didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan yang ketiganya memberikan kontribusi sebesar 79,41 persen, dimana peran masing-masing adalah sebesar 37,25 persen, 30,16 persen, dan 12,02 persen. Dengan memperhatikan peran yang besar dari ketiga sektor tersebut diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah

daerah diarahkan untuk dapat mempertahankan sekaligus mendorong berputarnya roda perekonomian dari ketiga sektor ini.

Tabel 3.1.2
Distribusi PDRB Riau Tanpa Migas
atas Dasar Harga Berlaku, 2003-2007
(%)

Sektor	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	37.51	36.66	38.16	38.28	37,25
2. Pertambangan	0.61	0.72	0.85	1.32	1.72
3. Industri	31.79	32.68	31.86	30.84	30.16
4. Listrik dan air	0.46	0.41	0.38	0.36	0.34
5. Bangunan	5.35	4.88	4.39	4.49	6,02
6. Perdagangan	11.16	11.47	11.54	11.79	12,02
7. Angkutan	3.69	3.56	3.41	3.39	3,29
8. Keuangan	2.64	3.07	3.25	3.31	3,35
9. Jasa-Jasa	6.79	6.54	6.17	6.23	5,86
T o t a l	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Provinsi Riau

Kontribusi terbesar terhadap perekonomian Riau diberikan oleh sektor pertanian. Perkembangan pesat pada subsektor perkebunan dan semakin mahal nya produk kehutanan memberi banyak kemajuan pada sektor pertanian secara keseluruhan. Selanjutnya, diikuti oleh peran sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Riau terutama akibat kemajuan yang dicapai pada industri pengolahan bahan kertas dan kertas, industri

pengolahan kayu, dan industri pengolahan kelapa sawit.

Masih pada tabel yang sama, terlihat bahwa peran sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang cukup besar yaitu 112,02 persen, hal ini terutama disebabkan oleh kegiatan subsektor perdagangan besar dan eceran yang perputaran barang dan jasanya cukup cepat, khususnya barang-barang tahan lama (*durable goods*), seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, dan HP. Selain itu akibat membaiknya sarana jalan dan transportasi serta bermunculannya pusat-pusat perbelanjaan baru yang menjadikan perputaran barang semakin cepat dan mudah.

Sementara itu, sektor bangunan pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar 6,02 persen terhadap perekonomian Riau. Sektor lainnya yaitu sektor pertambangan non migas yang memiliki pertumbuhan tertinggi, ternyata memberikan kontribusi masih kecil yaitu sebesar 1,72 persen. Ini mungkin karena produksi komoditas batu bara masih pada tahun-tahun awal dieksploitasi dan dieksplorasi. Kondisi yang sama terjadi pada sektor listrik dan air bersih. Keterbatasan daya serta kurangnya sumber pembangkit listrik yang baru menyebabkan kontribusi sektor listrik dan air bersih sulit berkembang. Pada tahun 2007

sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 0,34 persen.

3.1.3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita

PDRB dan pendapatan per kapita Riau mencerminkan secara tak langsung seberapa tinggi tingkat kemakmuran yang telah dicapai penduduk suatu daerah. Bila disajikan secara berkala, data tersebut akan dapat menunjukkan adanya perubahan kemakmuran yang terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat diinterpretasikan apakah perubahannya menunjukkan ke arah yang semakin membaik atau sebaliknya.

Data tentang PDRB dan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu daerah. Oleh karena itu, besar-kecilnya jumlah penduduk yang ada di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap besar-kecilnya nilai PDRB per kapita dan pendapatan per kapita.

Dari Tabel 3.1.3 terlihat bahwa PDRB per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2003-2007 mengalami peningkatan yang cukup nyata yaitu dari 11,70 juta rupiah di tahun 2003 naik menjadi 19,91 juta rupiah di tahun 2006 kemudian meningkat lagi menjadi 23,98 juta rupiah pada tahun 2007. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perkembangan dari kemajuan subsektor perkebunan, sub-

sektor pertambangan, dan subsektor industri pengolahan.

Tabel 3.1.3
PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau
Tanpa Migas, 2003-2007
(Juta Rp)

Rincian	Berlaku	Konstan 2000
(1)	(2)	(3)
PDRB PER KAPITA		
2003	11,70	6,40
2004	14,28	6,83
2005	17,26	7,32
2006	19,91	7,65
2007	23,08	7,77
PENDAPATAN PER KAPITA		
2003	10,70	5,85
2004	13,05	6,25
2005	15,78	6,69
2006	18,20	6,99
2007	21,01	7,11

Sumber: BPS Provinsi Riau

Pada periode yang sama, secara riil melalui PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000, menunjukkan arah yang juga meningkat dari 6,40 juta rupiah di tahun 2003 naik menjadi 7,65 juta rupiah di tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 7,77 juta rupiah di tahun 2007. Ini berarti ada peningkatan daya beli secara riil penduduk Riau selama periode tersebut. Kemudian masih dari Tabel 3.1.3, seiring dengan perkembangan PDRB per kapita maka pendapatan per kapita Riau atas dasar harga berlaku selama periode 2003-2007 juga mengalami kenaikan, dari 10,70 juta rupiah

di tahun 2003 menjadi 21,01 juta rupiah atau naik 1,96 kali pada tahun 2007.

Pada kurun waktu yang sama, secara riil tampaknya pendapatan per kapita memiliki pola yang sama dengan PDRB per kapita yang juga mengalami kenaikan dari sebesar 5,85 juta rupiah di tahun 2003 menjadi 7,11 juta rupiah atau naik 21,54 persen pada tahun 2006.

3.2 PDRB Dengan Migas

Minyak bumi merupakan salah satu komoditas yang sangat potensial dan diandalkan di Provinsi Riau. Minyak bumi adalah salah satu bahan bakar yang banyak digunakan untuk berbagai aktivitas ekonomi, antara lain untuk kegiatan berproduksi di sektor pertanian, sektor industri, sektor listrik dan air bersih, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor transportasi. Seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia, secara tidak langsung kontribusi ekonomi minyak bumi terhadap ekonomi Riau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

3.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Ekonomi Riau dengan memasukkan unsur migas selama kurun waktu dua tahun ini senantiasa lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada Tabel

3.2.1, terlihat jelas tentang laju pertumbuhan ekonomi Riau dari sebesar 5,41 persen selama tahun 2005 menjadi 5,15 persen di

Tabel 3.2.1
Pertumbuhan Ekonomi Riau Dengan Migas,
atas Dasar Harga Konstan 2000, 2003-2007
(%)

Sektor	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	6,32	7,00	6,77	5,97	4,84
2. Pertambangan	-0,70	-1,19	3,71	2,91	-0,13
3. Industri	5,81	9,53	5,60	6,78	8,63
4. Listrik dan air	3,10	10,44	9,20	5,86	5,62
5. Bangunan	6,34	9,10	7,15	8,27	11,65
6. Perdagangan	10,81	9,37	10,46	11,29	8,94
7. Angkutan	11,20	11,85	10,29	9,62	7,28
8. Keuangan	12,86	18,92	18,18	15,67	13,33
9. Jasa-Jasa	6,87	9,06	7,92	9,94	9,71
Total PDRB	2,45	2,93	5,41	5,15	3,41

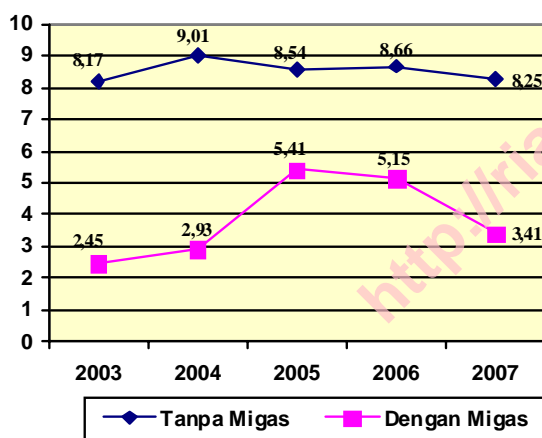
Sumber: BPS Provinsi Riau

tahun 2006 dan terakhir hanya sebesar 3,41 persen pada tahun 2007. Semakin lemahnya tingkat produksi subsektor pertambangan migas merupakan faktor utama yang memicu rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan migas, dan tercatat subsektor ini dari tahun 2005 tumbuh sebesar 3,71 persen, terus menjadi 2,91 persen dan terakhir tahun 2007 hanya sebesar -0,13 persen.

Sektor industri pengolahan mengalami percepatan pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2006, dimana sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 8,63

persen selama tahun 2007 dan hanya sebesar 6,78 persen pada tahun 2006. Percepatan pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan produksi industri pengolahan non migas dan industri migas. Produksi industri pengolahan non migas pada tahun 2007 tumbuh sebesar 11,41 persen, sedangkan tahun 2006 hanya tumbuh sebesar 9,11 persen. Untuk industri migas selama tahun 2007 tumbuh sebesar 1,07 persen lebih tinggi dari tahun 2006 yang hanya tumbuh sekitar 0,91 persen.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Riau, 2003-2007
(%)



Bila kita lihat secara umum dari Grafik 3.1 laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas terlihat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi Riau dengan migas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tanpa migas lebih stabil pada kisaran rata-rata di atas 8 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan migas yang berfluktuatif.

3.2.2 Kontribusi Sektoral

Dengan memasukkan unsur migas ke dalam perekonomian Riau, maka akan terlihat dominasi sektor pertambangan dan penggalian karena sektor ini mampu memberi kontribusi paling besar pada tahun 2007 yang mencapai angka 43,29 persen. Angka sebesar itu terutama disumbangkan oleh subsektor minyak dan gas bumi yang tercatat sebesar 42,43 persen.

Hanya dengan satu sektor ini hampir separuh perekonomian Riau bergantung kepadanya, sehingga sektor ini diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di Riau, yang tentunya perlu didukung dengan berbagai kebijakan kondusif dari *stakeholders*. Namun, perlu juga melakukan tindakan antisipasi guna mencari sumber daya ekonomi lain yang dapat dikembangkan di masa mendatang karena migas sebagai *unre-newable resources* tidak selamanya dapat diandalkan. Ini mulai terlihat dengan eksploitasi komoditas batu bara sebagai alternatif komoditas unggulan lain.

Pada Tabel 3.2.2, tampak bahwa selama periode 2003-2007 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sekitar 41-44 persen lebih. Sementara sektor pertanian dan sektor industri pada tahun 2007 berkontribusi masing-masing sebesar 20,76

persen dan 18,65 persen. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang pembentukan PDRB Riau dengan migas yakni sekitar 6,70 persen.

Tabel 3.2.2
Distribusi PDRB Riau Dengan Migas
atas Dasar Harga Berlaku, 2003-2007
(%)

Sektor	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	19,98	20,71	21,70	21,72	20,76
2. Pertambangan	44,81	41,56	41,67	42,15	43,39
3. Industri	19,19	20,83	20,06	19,34	18,65
4. Listrik dan air	0,24	0,23	0,22	0,20	0,19
5. Bangunan	2,85	2,76	2,49	2,55	3,35
6. Perdagangan	5,94	6,48	6,56	6,69	6,70
7. Angkutan	1,97	2,01	1,94	1,93	1,83
8. Keuangan	1,40	1,74	1,85	1,88	1,87
9. Jasa-Jasa	3,62	3,70	3,51	3,53	3,26
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau

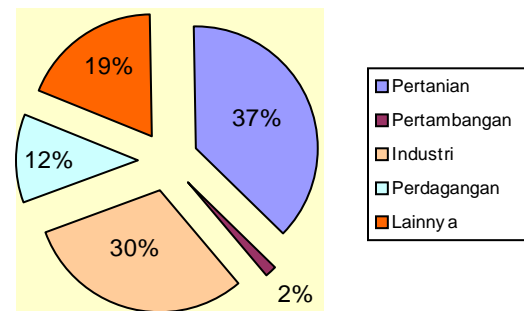
Dengan mencermatinya lebih mendalam ternyata perekonomian Riau mengarah pada perubahan struktur ekonomi yang positif. Sebelum tahun 2003-2007 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian selalu di atas 50 persen, tetapi pada periode tersebut perannya mulai digantikan oleh sektor industri pengolahan dan perkebunan. Disamping itu, secara ekonomi regional kedua sektor ini lebih menyentuh ke masyarakat tempatan dan unggul dari sisi akses nilai tambahnya karena berpeluang besar berkontribusi

langsung ke segala lapisan masyarakat tempatan. Perubahan ini bagus karena di masa mendatang ketergantungan terhadap minyak bumi tidak baik sebab secara perlahan kandungan minyak bumi akan habis.

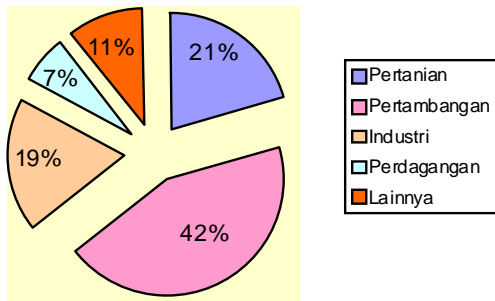
Sama halnya dengan kontribusi ekonomi tanpa migas sektor dengan peran paling rendah selama periode 2003-2007 adalah sektor listrik dan air bersih dan bahkan perannya terhadap pembentukan PDRB Riau dengan migas di bawah 0,3 persen. Pada tahun 2007 hanya sebesar 0,19 persen, melihat peranan sektor ini yang sangat rendah, baik pada struktur ekonomi tanpa maupun dengan migas, diharapkan muncul kebijakan yang dapat mendorong kemajuannya mengingat keberadaannya menjadi salah satu faktor penting dan sangat dibutuhkan.

Grafik 3.2
Distribusi PDRB Riau atas Dasar
Harga Berlaku, 2007
(%)

A. Tanpa Migas



B. Dengan Migas



Kemudian mobilitas komoditas, tingkat produksi dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan faktor produksi akan sangat tergantung pada sektor angkutan dan komunikasi. Sehingga sektor ini sangat berperan penting dalam bertugas mendistribusikan barang dan jasa dari suatu tempat (daerah) ke tempat tujuan (daerah lain) dengan aman dan efektif, dan juga sebagai sarana berkomunikasi antar pelaku ekonomi agar aktivitas ekonominya lancar dan efisien. Namun, melihat angka kontribusinya yang hanya dibawah 2 (dua) persen selama periode 2003-2007, artinya masih jauh dari harapan. Semoga dengan semakin pesatnya perekonomian di Riau, prasarana dan sarana jalan akan semakin baik. Sehingga distribusi barang serta akses dari satu daerah ke daerah lain semakin bertambah lancar.

Selama kurun waktu tahun 2003-2007, peran sektor bangunan (konstruksi) pada perekonomian Riau dengan migas juga

masih di bawah 3 persen, namun selama tahun 2007 kontribusinya berkembang menjadi lebih besar yakni menjadi 3,35 persen. Ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi Riau selama tahun 2007 berkembang lebih baik dari tahun sebelumnya, meskipun demikian program pemerintah guna mengejar ketertinggalan infrastruktur tetap harus terus menjadi prioritas.

Sektor keuangan juga tampaknya mulai stabil didalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Riau dengan migas. Semakin pulihnya kepercayaan perbankan kepada pengusaha sektor riil dan masyarakat dengan memberikan akses kemudahan sehingga masyarakat dan pelaku sektor riil lebih berani dalam mengambil kredit dari perbankan. Selain itu, adanya jaminan dari pemerintah pusat dan pemprov terhadap usaha kecil menengah yang akan mengambil kredit turut mendukung kelancaran proses dan syarat-syarat pencairan kredit untuk usaha kecil semakin mudah.

Tampaknya perkembangan setiap sektor, baik dari segi pertumbuhan maupun kontribusi di dalam perekonomian Riau tanpa atau dengan migas semakin menunjukkan arah yang positif menuju pencapaian Visi Riau 2020 yakni "Terwujudnya Provinsi

Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu di kawasan Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera Lahir dan Bathin pada tahun 2020". Namun begitu hendaknya pemerintah tidak cukup puas dengan pencapaian saat ini. Masih banyak pembenahan pada sektor-sektor tertentu yang harus dikejar dimasa yang akan datang.

3.2.3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita

Sebagai salah satu ukuran makro tentang kemakmuran di suatu daerah maka PDRB dan Pendapatan Per Kapita menjadi perlu untuk dianalisis. Pada Tabel 3.2.3 terlihat bahwa PDRB maupun Pendapatan Per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama periode 2003-2007. Sementara secara riil (atas dasar harga konstan) juga menunjukkan adanya kecenderungan meningkat selama periode 2003-2007.

Pada tahun 2003, PDRB per kapita Riau atas dasar harga berlaku mencapai 21,97 juta rupiah meningkat menjadi 41,41 juta rupiah di tahun 2007. Sementara secara riil, PDRB per kapita Riau di tahun 2003

Tabel 3.2.3
PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau
Dengan Migas, 2003-2007
(Juta Rp)

Rincian	Berlaku	Konstan 2000
(1)	(2)	(3)
PDRB PER KAPITA		
2003	21,97	16,50
2004	25,28	16,64
2005	30,36	17,31
2006	35,08	17,51
2007	41,41	17,00
PENDAPATAN PER KAPITA		
2003	20,08	15,09
2004	23,10	15,21
2005	27,75	15,83
2006	32,07	16,00
2007	37,86	15,54

Sumber: BPS Provinsi Riau

sebesar 16,50 juta rupiah menjadi 17,00 juta rupiah pada tahun 2007, atau naik sebesar 3,03 persen.

Sedangkan gejolak pendapatan per kapita tampak sama dengan kondisi PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun dilihat secara riilnya.

Seiring dengan PDRB per kapita, selama tahun 2003-2007, pola pendapatan per kapita juga menunjukkan hal yang sama, yakni pada harga berlaku menunjukkan arah yang meningkat dari 20,08 juta rupiah di tahun 2003 menjadi 37,86 juta rupiah pada tahun 2007 atau ada peningkatan sebesar 18,05 persen.

4

Perkembangan PDRB

Antar Daerah

BAB IV

PERBANDINGAN PDRB ANTAR DAERAH

Bab ini menyajikan perbandingan beberapa ukuran makro ekonomi, yang diturunkan dari PDRB di masing-masing provinsi, dan sekaligus untuk menggambarkan posisi Riau di antara provinsi lain se-Sumatera dan Indonesia. Beberapa ukuran makro ekonomi yang diperbandingkan adalah laju pertumbuhan, struktur ekonomi dan PDRB Per Kapita.

Perkembangan PDRB se-Sumatera

Letak geografis Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa provinsi seperti provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Riau, selain itu, Riau juga berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Setelah pisah dengan Kepulauan Riau, Provinsi Riau telah menyiapkan pelabuhan khusus sebagai tempat bongkar muat barang yang terletak di Kota Dumai. Ini menjadikan Provinsi Riau sering kali via Kota Dumai sebagai daerah jangkar untuk melakukan ekspor dari berbagai daerah *hinterland*. Disamping itu, letak geografis Provinsi Riau merupakan jalur lintas Sumatera yang banyak digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas barang dan

jasa dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa atau sebaliknya.

Dengan letak geografis Provinsi Riau yang strategis tersebut menjadikan Provinsi Riau secara ekonomi sangat menguntungkan. Sebagai daerah persimpangan jalan dan jalur lintasan atau transit, kegiatan ekonomi masyarakatnya memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi terciptanya kegiatan produksi dan nilai tambah. Misalnya, dengan melakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara dan provinsi lain, yang akan menciptakan dan mendorong kesempatan berusaha yang saling menguntungkan. Dengan demikian kerjasama seperti itu akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi regional. Dengan posisi yang strategis tersebut, Provinsi Riau semakin diperhitungkan di dalam perekonomian nasional dan regional.

4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sejak pertengahan tahun 2006, kondisi makro ekonomi pasca kenaikan BBM di tahun 2005 telah pulih kembali sehingga seluruh proses kegiatan produksi dan penciptaan nilai tambah di hampir

seluruh provinsi di Indonesia berkembang lagi seperti sediakala.

Seperti pada Tabel 4.1.1 terlihat pada tahun 2007 semua provinsi di Sumatera mengalami pertumbuhan ekonomi positif bahkan mengalami percepatan pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2007, Provinsi Riau ternyata masih menjadi motor pemicu paling utama dalam menggerakkan roda perekonomian se-Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni mencapai 8,25 persen. Lalu diikuti Sumatera Selatan yang mencapai 8,04 persen, Kepulauan Riau sebesar 7,55 persen, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebesar 7,46 persen, Sumatera Utara sebesar 6,89 persen, dan Sumatera Barat sebesar 6,34 persen. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi Riau tersebut masih lebih tinggi dari pertumbuhan se-Sumatera dan nasional yang masing-masing sebesar 7,03 persen dan 6,92 persen.

Masih pada Tabel 4.1.1, terlihat selama periode 2003-2007 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau menempati posisi tertinggi di Sumatera. Dengan posisi pertumbuhan Provinsi Riau yang selalu di atas provinsi lain se-Sumatera dan adanya kerjasama serta kesepahaman yang dilakukan oleh para petinggi se-Sumatera dan negara Malaysia serta Singapura, diharapkan Provinsi Riau dapat menjadi motor terdepan

di dalam rangka memajukan perekonomian se-Sumatera. Ini tidak terlepas dari upaya Pemprov Riau dalam mewujudkan Visi Riau 2020. Beberapa pembangunan infrastruktur baru telah dibangun atau ditingkatkan lagi kualitasnya seperti pelabuhan internasional di Buton dan pengembangan pelabuhan laut di Dumai untuk menjadi pelabuhan perdagangan bebas.

Tabel 4.1.1
Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas
Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga
Konstan 2000, 2003-2007
(%)

PROVINSI	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. NAD	3,70	1,76	1,22	7,70	7,46
2. Sumut	4,94	6,00	5,52	6,26	6,89
3. Sumbar	5,26	5,46	5,73	6,14	6,34
4. Riau	8,17	9,01	8,54	8,66	8,25
5. Jambi	5,55	6,48	6,25	8,35	6,58
6. Sumsel	5,74	6,79	6,91	7,31	8,04
7. Bengkulu	5,37	5,38	5,82	5,95	6,03
8. Lampung	5,63	5,76	4,61	5,31	6,14
9. Kep.Babel	5,06	4,31	4,66	4,54	5,19
10. Kepri	6,33	7,42	7,08	7,23	7,55
SUMATERA	5,54	6,08	5,78	6,69	7,03
INDONESIA	5,69	5,99	6,57	6,13	6,92

Sumber: BPS Provinsi Riau

Dari data historis selama periode 2003-2007 tersebut memberi isyarat bahwa perkembangan perekonomian Provinsi Riau dalam beberapa tahun mendatang akan cenderung meningkat seiring dengan

perkembangan ekonomi yang terjadi secara nasional dan di beberapa negara ASEAN. Oleh karenanya, cukup banyak para investor dari berbagai negara ASEAN yang berminat untuk menanamkan modalnya di Riau

4.2 Kontribusi PDRB

Kontribusi Provinsi se-Sumatera terhadap penciptaan ekonomi nasional (total 33 provinsi seluruh Indonesia) selama periode 2003-2007 berkisar pada angka 19,60 persen sampai dengan 20,34 persen, seperti yang terlihat pada Tabel 4.1.2, kontribusinya sedikit mengalami penurunan pada tahun 2004-2005 yaitu dari 19,95 persen menjadi 19,72 persen. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan kontribusi ekonomi dari Kawasan Timur Indonesia terutama NTT, NTB, Irian, dan Maluku. Kemudian pada tahun 2004 kontribusinya bertambah besar menjadi sebesar 20,34 persen.

Penyebab perubahan kontribusi tersebut diperkirakan akibat adanya perbedaan pada realisasi potensi sumber daya alam, infrastruktur, modal yang tersedia, dan kemampuan sumber daya manusia di masing-masing provinsi sehingga membuat kontribusi PDRB menjadi bervariasi baik antar provinsi maupun antar pulau.

Selama periode 2003-2007, di Sumatera yang memberikan kontribusi

terbesar terhadap ekonomi diberikan oleh Sumatera Utara dengan peran berkisar sebesar 5,69 persen. Peran tersebut sedikit menurun, tercatat bahwa di tahun 2005 mampu memberikan kontribusi sebesar 5,82 persen, lalu turun menjadi 5,71 persen pada tahun 2006 dan menjadi 5,69 selama tahun 2007. Sementara, Bengkulu menduduki peringkat terendah dalam memberikan kontribusinya terhadap ekonomi nasional yakni hanya mampu mencapai di bawah 0,40 persen.

Untuk Riau dengan kontribusi di tahun 2007 sebesar 3,60 persen berada pada urutan kedua setelah Sumatera Utara, sedangkan nomor tiga adalah Sumatera Selatan. Namun demikian, peran ekonomi Riau terlihat cenderung meningkat, yakni dari sebesar 3,40 persen di tahun 2006 naik menjadi 3,69 persen pada tahun 2007. Dengan kondisi ini, agar peran Riau semakin diperhitungkan di dalam perekonomian nasional dan regional maka ada baiknya untuk memperbaiki beberapa kondisi seperti infrastruktur, dan sumber daya manusia serta melakukan terobosan kebijakan strategis lainnya, untuk mampu lebih optimal menggali potensi sumber daya alam yang ada. Sehingga harapan Riau yang tertuang dalam Visi Riau 2020 semakin dapat diwujudkan. Hal ini tentunya menjadi tantangan berat namun sekaligus dapat

menjadi stimulus untuk pemacu pembangunan perekonomian di Bumi Lancang Kuning.

Tabel 4.1.2
Distribusi PDRB Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga Berlaku 2003-2007 (%)

PROVINSI	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. NAD	1,53	1,51	1,49	1,61	1,63
2. Sumut	5,81	5,89	5,82	5,71	5,69
3. Sumbar	1,88	1,88	1,88	1,90	1,88
4. Riau	2,93	3,24	3,32	3,40	3,69
5. Jambi	0,76	0,79	0,77	0,79	0,84
6. Sumsel	2,27	2,28	2,21	2,28	2,36
7. Bengkulu	0,41	0,41	0,43	0,41	0,40
8. Lampung	1,77	1,75	1,66	1,71	1,80
9. Kep.Babel	0,52	0,53	0,57	0,55	0,55
10. Kepri	1,73	1,69	1,57	1,50	1,49
SUMATERA	19,62	19,95	19,72	19,86	20,34
LAINNYA	80,38	80,03	80,28	80,14	79,66
TOTAL 30 PROVINSI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau

4.3 PDRB Per Kapita

Tingkat kemakmuran masyarakat di suatu daerah dapat ditinjau dari berbagai sisi baik dari sisi kesejahteraan rakyat (kesra) maupun ekonomi. Beberapa indikator dapat dijadikan ukuran kemakmuran misalnya bidang kesehatan seperti indikator angka harapan hidup, apabila angka harapan hidup meningkat maka dapat dikatakan di daerah itu kemakmuran meningkat pula. Sedangkan

dari sisi ekonomi biasanya kemakmuran suatu daerah diukur melalui indikator makro ekonomi seperti PDRB per kapita. Dengan penyajian series angka PDRB per kapita dapat diikuti perkembangan atas kemakmuran di suatu daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.

Dari Tabel 4.1.3 tampak bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Sumatera pada tahun 2003 sebesar 7,73 juta rupiah lalu meningkat menjadi sebesar 13,49 juta rupiah pada tahun 2007, sehingga ada peningkatan sebesar 74,51 persen dalam kurun waktu empat tahun. Begitu pula pada periode yang sama, perkembangan secara riil yang dicerminkan oleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan, juga mengalami peningkatan, pada tahun 2003 PDRB per kapita atas dasar harga konstan sebesar 5,79 uta rupiah naik menjadi 6,96 juta rupiah di tahun 2007, ada kenaikan sebesar 20,21 persen.

Sementara itu PDRB per kapita Riau atas dasar harga berlaku pada tahun 2007 yang mencapai sebesar 23,08 juta rupiah, menempatkan Riau berada pada urutan kedua setelah Kepulauan Riau kemudian pada posisi ketiga sampai kelima adalah Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Posisi Riau yang berada di urutan kedua sebagai akibat meningkatnya

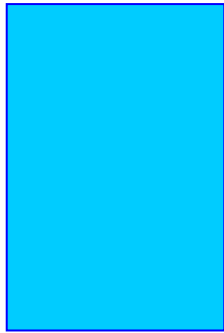
aktivitas ekonomi di Riau sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk masih kecil, Namun begitu akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi di Riau maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah migrasi, karena Riau dipandang sebagai wilayah tujuan alternatif untuk meningkatkan derajat ekonomi mereka. Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan investasinya di Riau, diharapkan akan mendongkrak lebih tinggi lagi kemakmuran masyarakat Riau secara nyata.

Namun dilihat secara riil melalui angka PDRB per kapita Riau harga konstan di tahun 2007 mencapai sebesar 7,77 juta rupiah, yang menempatkan posisi Riau berada pada urutan ketiga setelah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Bahkan angka PDRB per kapita Riau tersebut lebih tinggi dari rata-rata se-Sumatera yang hanya mencapai 6,96 juta. Hal ini menandakan daya beli masyarakat Riau masih lebih baik dari rata-rata se-Sumatera pada periode tersebut.

Tabel 4.1.3
PRDB Per Kapita Tanpa Migas menurut Provinsi se-Sumatera, 2003-2007
(Juta Rupiah)

PROVINSI	ATAS DASAR HARGA BERLAKU					ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. NAD	6,37	7,37	8,79	11,02	12,27	5,16	5,44	5,58	5,96	6,17
2. Sumut	8,60	9,67	11,13	12,59	14,05	6,54	6,82	7,01	7,33	7,72
3. Sumbar	7,40	8,24	9,78	11,45	12,73	5,84	6,08	6,39	6,68	7,01
4. Riau	11,70	14,28	17,27	19,91	23,08	6,40	6,83	7,32	7,65	7,77
5. Jambi	5,21	5,97	6,98	8,23	9,55	3,79	3,97	4,19	4,37	4,66
6. Sumsel	6,15	6,86	7,77	9,20	10,67	4,88	5,12	5,35	5,65	6,00
7. Bengkulu	4,75	5,23	6,41	7,12	7,93	3,67	3,81	3,03	4,22	4,34
8. Lampung	4,49	4,94	5,53	6,62	8,16	3,74	3,90	4,05	4,21	4,42
9. Kep. Babel	9,21	10,33	13,00	14,24	15,37	7,34	7,39	8,03	8,17	8,37
10. Kepri	26,10	28,20	29,35	31,36	34,04	21,26	22,37	22,42	22,89	23,65
SUMATERA	7,73	8,77	10,19	11,78	13,49	5,79	6,07	6,34	6,64	6,96

Sumber: BPS Provinsi Riau



Lampiran

Tabel-tabel Pokok

**TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2003-2007
(Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	19.431.336,22	23.656.421,85	30.171.587,33	36.294.175,88	43.595.169,01
a. Tanaman Bahan Makanan	1.830.269,64	2.076.352,45	2.178.669,17	2.258.486,66	2.437.302,65
b. Tanaman Perkebunan	8.751.031,13	11.096.205,43	14.941.137,11	18.483.893,11	22.257.311,01
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	673.638,71	766.777,62	874.541,29	1.013.481,96	1.198.936,50
d. Kehutanan	6.246.226,42	7.358.992,41	9.397.580,56	11.279.160,84	13.899.720,42
e. Perikanan	1.930.170,32	2.358.093,94	2.779.659,20	3.259.153,31	3.801.898,43
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	43.585.096,83	47.475.704,94	57.927.709,65	70.427.525,42	91.119.826,29
a. Minyak dan Gas Bumi	43.270.103,46	47.011.122,97	57.259.547,78	69.178.832,03	89.103.779,09
b. Pertambangan tanpa Migas	45.007,26	153.239,15	310.353,96	800.053,40	1.410.745,53
c. Penggalian	269.986,11	311.342,82	357.807,91	448.639,99	605.301,67
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	18.671.313,02	23.793.107,99	27.881.009,28	32.313.284,03	39.156.003,58
a. Industri Migas	2.205.962,27	2.707.375,49	2.694.076,91	3.073.755,38	3.863.797,55
b. Industri Tanpa Migas	16.465.350,75	21.085.732,50	25.186.932,37	29.239.528,65	35.292.206,03
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	235.816,77	264.640,00	303.326,53	339.751,00	392.735,09
a. Listrik	190.086,44	208.009,42	240.118,31	268.468,09	314.804,19
b. Air Bersih	45.730,33	56.630,58	63.208,22	71.282,91	77.930,90
5. BANGUNAN	2.771.513,80	3.150.746,99	3.467.556,82	4.258.801,15	7.043.077,64
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	5.782.993,53	7.403.066,08	9.124.858,24	11.179.723,48	14.064.410,65
a. Perdagangan Besar dan Eceran	5.509.133,71	6.892.454,42	8.460.376,62	10.356.023,74	13.089.032,72
b. Hotel	137.872,15	291.624,54	395.866,58	496.733,66	586.083,53
c. Restoran	135.987,67	218.987,12	268.615,04	326.966,08	389.294,41
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.913.878,27	2.296.934,94	2.694.577,78	3.216.185,09	3.853.213,88
a. Pengangkutan	1.693.001,58	2.017.961,61	2.355.338,42	2.802.239,28	3.356.896,30
1. Angkutan Darat	1.127.286,65	1.301.309,33	1.500.003,12	1.787.306,98	2.152.635,90
2. Angkutan Laut	318.166,17	356.692,83	423.922,08	507.491,93	608.772,19
3. Angkutan Udara	82.837,15	92.237,74	114.816,17	146.886,01	189.128,55
4. Jasa Penunjang Angkutan	164.711,61	267.721,71	316.597,05	360.554,35	406.359,65
b. Komunikasi	220.876,69	278.973,33	339.239,36	413.945,81	496.317,58
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	1.364.962,03	1.982.730,36	2.569.166,68	3.134.172,22	3.924.150,41
a. Bank	573.489,33	977.482,44	1.376.415,36	1.673.887,00	2.068.992,84
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	106.981,88	145.472,35	173.857,74	214.959,17	257.051,89
c. Sewa Bangunan	621.216,18	782.232,08	926.771,48	1.132.732,85	1.448.121,54
d. Jasa Perusahaan	63.274,64	77.543,49	92.122,10	112.593,20	149.984,14
9. JASA - JASA	3.518.367,34	4.223.020,53	4.879.203,84	5.904.570,60	6.853.973,75
a. Pemerintahan Umum	2.703.215,48	3.254.327,58	3.754.327,58	4.522.838,44	5.111.541,73
b. Swasta	815.151,86	968.692,95	1.124.876,26	1.381.732,16	1.742.432,02
1. Sosial Kemasyarakatan	60.345,47	74.360,21	88.229,17	104.914,20	128.756,79
2. Hiburan dan rekreasi	99.099,70	121.593,50	140.267,83	170.247,92	226.044,25
3. Perorangan dan Rumahtangga	655.706,69	772.739,23	896.379,26	1.106.570,04	1.387.630,98
PDRB TERMASUK MIGAS	97.275.277,80	114.246.373,66	139.018.996,15	167.068.188,88	210.002.560,30
PDRB TANPA MIGAS	51.799.212,07	64.527.875,21	79.065.371,46	94.815.601,47	117.034.983,66

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2003-2007
(Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	11.649.245,97	12.464.887,42	13.308.660,62	14.103.047,84	14.785.911,40
a. Tanaman Bahan Makanan	1.594.506,03	1.649.395,17	1.689.455,26	1.724.881,20	1.768.512,67
b. Tanaman Perkebunan	4.074.206,58	4.369.777,82	4.792.832,66	5.252.099,26	5.622.057,76
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	580.458,27	609.783,03	653.525,97	699.643,99	751.979,61
d. Kehutanan	4.322.953,99	4.679.814,25	4.920.276,33	5.074.529,74	5.186.666,49
e. Perikanan	1.077.121,09	1.156.117,15	1.252.570,40	1.351.893,65	1.456.694,87
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	42.844.015,03	42.334.556,31	43.906.875,82	45.183.667,56	45.125.692,40
a. Minyak dan Gas Bumi	42.607.918,32	42.018.023,58	43.504.120,23	44.665.680,24	44.480.426,90
b. Pertambangan tanpa Migas	21.722,31	76.283,35	144.633,34	229.674,74	323.161,62
c. Penggalian	214.374,40	240.249,39	258.122,25	288.312,58	322.103,88
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	6.892.315,51	7.549.378,94	7.972.127,07	8.512.386,69	9.246.973,72
a. Industri Migas	2.143.267,06	2.318.927,93	2.266.924,86	2.287.553,88	2.312.072,47
b. Industri Tanpa Migas	4.749.048,45	5.230.451,01	5.705.202,21	6.224.832,81	6.934.901,25
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	137.226,29	151.556,65	165.499,00	175.200,34	185.050,79
a. Listrik	113.381,12	126.587,02	139.736,33	148.554,95	157.539,15
b. Air Bersih	23.845,17	24.969,63	25.762,67	26.645,39	27.511,65
5. BANGUNAN	1.892.746,43	2.064.977,55	2.212.679,83	2.395.732,42	2.674.930,31
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	4.683.120,21	5.121.976,81	5.641.815,35	6.278.665,89	6.840.260,85
a. Perdagangan Besar dan Eceran	4.527.458,05	4.951.976,08	5.453.810,45	6.071.558,29	6.613.065,87
b. Hotel	79.713,62	87.181,63	96.018,57	105.769,39	115.369,99
c. Restoran	75.948,54	82.819,10	91.986,33	101.338,21	111.824,99
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.604.702,91	1.794.891,88	1.982.655,81	2.173.442,62	2.331.648,28
a. Pengangkutan	1.451.114,03	1.611.354,05	1.760.596,85	1.905.429,35	2.010.195,81
1. Angkutan Darat	1.000.518,68	1.092.605,76	1.195.699,12	1.299.202,68	1.352.923,62
2. Angkutan Laut	263.283,58	291.098,65	306.087,01	322.412,93	345.590,28
3. Angkutan Udara	82.254,43	103.744,15	121.170,51	133.777,15	147.439,15
4. Jasa Penunjang Angkutan	105.057,34	123.905,49	137.640,21	150.036,59	164.242,76
b. Komunikasi	153.588,88	183.537,83	222.058,96	268.013,27	321.452,47
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	549.238,94	653.130,59	771.841,96	892.826,69	1.011.841,54
a. Bank	84.863,05	129.654,68	194.169,46	264.562,28	320.483,32
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	51.458,50	55.915,85	60.660,12	65.534,34	72.074,44
c. Sewa Bangunan	369.876,12	419.382,89	464.101,85	505.464,68	554.668,27
d. Jasa Perusahaan	43.041,27	48.177,17	52.910,53	57.265,38	64.615,51
9. JASA - JASA	2.825.348,20	3.081.363,13	3.325.431,29	3.655.897,19	4.010.950,18
a. Pemerintahan Umum	2.184.789,93	2.378.271,92	2.545.684,84	2.800.377,59	3.063.274,58
b. Swasta	640.558,27	703.091,21	779.746,45	855.519,60	947.675,60
1. Sosial Kemasyarakatan	49.313,17	56.031,30	61.431,11	66.975,37	73.138,11
2. Hiburan dan rekreasi	73.714,13	79.257,43	86.943,57	97.207,27	107.512,53
3. Perorangan dan Rumahtangga	517.530,98	567.802,48	631.371,77	691.336,97	767.024,96
PDRB TERMASUK MIGAS	73.077.959,49	75.216.719,28	79.287.586,75	83.370.867,24	86.213.259,46
PDRB TANPA MIGAS	28.326.774,11	30.879.767,77	33.516.541,66	36.417.633,12	39.420.760,09

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TERMASUK MIGAS
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	19,98	20,71	21,70	21,72	20,76
a. Tanaman Bahan Makanan	1,88	1,82	1,57	1,35	1,16
b. Tanaman Perkebunan	9,00	9,71	10,75	11,06	10,60
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,69	0,67	0,63	0,61	0,57
d. Kehutanan	6,42	6,44	6,76	6,75	6,62
e. Perikanan	1,98	2,06	2,00	1,95	1,81
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	44,81	41,56	41,67	42,15	43,39
a. Minyak dan Gas Bumi	44,48	41,15	41,19	41,41	42,43
b. Pertambangan tanpa Migas	0,05	0,13	0,22	0,48	0,67
c. Penggalian	0,28	0,27	0,26	0,27	0,29
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	19,19	20,83	20,06	19,34	18,65
a. Industri Migas	2,27	2,37	1,94	1,84	1,84
b. Industri Tanpa Migas	16,93	18,46	18,12	17,50	16,81
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0,24	0,23	0,22	0,20	0,19
a. Listrik	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15
b. Air Bersih	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
5. BANGUNAN	2,85	2,76	2,49	2,55	3,35
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	5,94	6,48	6,56	6,69	6,70
a. Perdagangan Besar dan Eceran	5,66	6,03	6,09	6,20	6,23
b. Hotel	0,14	0,26	0,28	0,30	0,28
c. Restoran	0,14	0,19	0,19	0,20	0,19
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1,97	2,01	1,94	1,93	1,83
a. Pengangkutan	1,74	1,77	1,69	1,68	1,60
1. Angkutan Darat	1,16	1,14	1,08	1,07	1,03
2. Angkutan Laut	0,33	0,31	0,30	0,30	0,29
3. Angkutan Udara	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09
4. Jasa Penunjang Angkutan	0,17	0,23	0,23	0,22	0,19
b. Komunikasi	0,23	0,24	0,24	0,25	0,24
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	1,40	1,74	1,85	1,88	1,87
a. Bank	0,59	0,86	0,99	1,00	0,99
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,11	0,13	0,13	0,13	0,12
c. Sewa Bangunan	0,64	0,68	0,67	0,68	0,69
d. Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
9. JASA - JASA	3,62	3,70	3,51	3,53	3,26
a. Pemerintahan Umum	2,78	2,85	2,70	2,71	2,43
b. Swasta	0,84	0,85	0,81	0,83	0,83
1. Sosial Kemasyarakatan	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
2. Hiburan dan rekreasi	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11
3. Perorangan dan Rumahtangga	0,67	0,68	0,64	0,66	0,66
PDRB TERMASUK MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TERMASUK MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	15,94	16,57	16,79	16,92	17,15
a. Tanaman Bahan Makanan	2,18	2,19	2,13	2,07	2,05
b. Tanaman Perkebunan	5,58	5,81	6,04	6,30	6,52
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,79	0,81	0,82	0,84	0,87
d. Kehutanan	5,92	6,22	6,21	6,09	6,02
e. Perikanan	1,47	1,54	1,58	1,62	1,69
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	58,63	56,28	55,38	54,20	52,34
a. Minyak dan Gas Bumi	58,30	55,86	54,87	53,57	51,59
b. Pertambangan tanpa Migas	0,03	0,10	0,18	0,28	0,37
c. Penggalian	0,29	0,32	0,33	0,35	0,37
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	9,43	10,04	10,05	10,21	10,73
a. Industri Migas	2,93	3,08	2,86	2,74	2,68
b. Industri Tanpa Migas	6,50	6,95	7,20	7,47	8,04
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21
a. Listrik	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18
b. Air Bersih	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5. BANGUNAN	2,59	2,75	2,79	2,87	3,10
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	6,41	6,81	7,12	7,53	7,93
a. Perdagangan Besar dan Eceran	6,20	6,58	6,88	7,28	7,67
b. Hotel	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13
c. Restoran	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2,20	2,39	2,50	2,61	2,70
a. Pengangkutan	1,99	2,14	2,22	2,29	2,33
1. Angkutan Darat	1,37	1,45	1,51	1,56	1,57
2. Angkutan Laut	0,36	0,39	0,39	0,39	0,40
3. Angkutan Udara	0,11	0,14	0,15	0,16	0,17
4. Jasa Penunjang Angkutan	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19
b. Komunikasi	0,21	0,24	0,28	0,32	0,37
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	0,75	0,87	0,97	1,07	1,17
a. Bank	0,12	0,17	0,24	0,32	0,37
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
c. Sewa Bangunan	0,51	0,56	0,59	0,61	0,64
d. Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
9. JASA - JASA	3,87	4,10	4,19	4,39	4,65
a. Pemerintahan Umum	2,99	3,16	3,21	3,36	3,55
b. Swasta	0,88	0,93	0,98	1,03	1,10
1. Sosial Kemasyarakatan	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
2. Hiburan dan rekreasi	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
3. Perorangan dan Rumahtangga	0,71	0,75	0,80	0,83	0,89
PDRB TERMASUK MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 5. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TANPA MIGAS
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	37,51	36,66	38,16	38,28	37,25
a. Tanaman Bahan Makanan	3,53	3,22	2,76	2,38	2,08
b. Tanaman Perkebunan	16,89	17,20	18,90	19,49	19,02
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,30	1,19	1,11	1,07	1,02
d. Kehutanan	12,06	11,40	11,89	11,90	11,88
e. Perikanan	3,73	3,65	3,52	3,44	3,25
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,61	0,72	0,85	1,32	1,72
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	0,09	0,24	0,39	0,84	1,21
c. Penggalian	0,52	0,48	0,45	0,47	0,52
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	31,79	32,68	31,86	30,84	30,16
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	31,79	32,68	31,86	30,84	30,16
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0,46	0,41	0,38	0,36	0,34
a. Listrik	0,37	0,32	0,30	0,28	0,27
b. Air Bersih	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
5. BANGUNAN	5,35	4,88	4,39	4,49	6,02
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	11,16	11,47	11,54	11,79	12,02
a. Perdagangan Besar dan Eceran	10,64	10,68	10,70	10,92	11,18
b. Hotel	0,27	0,45	0,50	0,52	0,50
c. Restoran	0,26	0,34	0,34	0,34	0,33
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	3,69	3,56	3,41	3,39	3,29
a. Pengangkutan	3,27	3,13	2,98	2,96	2,87
1. Angkutan Darat	2,18	2,02	1,90	1,89	1,84
2. Angkutan Laut	0,61	0,55	0,54	0,54	0,52
3. Angkutan Udara	0,16	0,14	0,15	0,15	0,16
4. Jasa Penunjang Angkutan	0,32	0,41	0,40	0,38	0,35
b. Komunikasi	0,43	0,43	0,43	0,44	0,42
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	2,64	3,07	3,25	3,31	3,35
a. Bank	1,11	1,51	1,74	1,77	1,77
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,21	0,23	0,22	0,23	0,22
c. Sewa Bangunan	1,20	1,21	1,17	1,19	1,24
d. Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
9. JASA - JASA	6,79	6,54	6,17	6,23	5,86
a. Pemerintahan Umum	5,22	5,04	4,75	4,77	4,37
b. Swasta	1,57	1,50	1,42	1,46	1,49
1. Sosial Masyarakat	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
2. Hiburan dan rekreasi	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19
3. Perorangan dan Rumahtangga	1,27	1,20	1,13	1,17	1,19
PDRB TANPA MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 6. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TANPA MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	41,12	40,37	39,71	38,73	37,51
a. Tanaman Bahan Makanan	5,63	5,34	5,04	4,74	4,49
b. Tanaman Perkebunan	14,38	14,15	14,30	14,42	14,26
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,05	1,97	1,95	1,92	1,91
d. Kehutanan	15,26	15,15	14,68	13,93	13,16
e. Perikanan	3,80	3,74	3,74	3,71	3,70
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,83	1,03	1,20	1,42	1,64
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	0,08	0,25	0,43	0,63	0,82
c. Penggalian	0,76	0,78	0,77	0,79	0,82
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	16,77	16,94	17,02	17,09	17,59
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	16,77	16,94	17,02	17,09	17,59
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0,48	0,49	0,49	0,48	0,47
a. Listrik	0,40	0,41	0,42	0,41	0,40
b. Air Bersih	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
5. BANGUNAN	6,68	6,69	6,60	6,58	6,79
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	16,53	16,59	16,83	17,24	17,35
a. Perdagangan Besar dan Eceran	15,98	16,04	16,27	16,67	16,78
b. Hotel	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29
c. Restoran	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	5,66	5,81	5,92	5,97	5,91
a. Pengangkutan	5,12	5,22	5,25	5,23	5,10
1. Angkutan Darat	3,53	3,54	3,57	3,57	3,43
2. Angkutan Laut	0,93	0,94	0,91	0,89	0,88
3. Angkutan Udara	0,29	0,34	0,36	0,37	0,37
4. Jasa Penunjang Angkutan	0,37	0,40	0,41	0,41	0,42
b. Komunikasi	0,54	0,59	0,66	0,74	0,82
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	1,94	2,12	2,30	2,45	2,57
a. Bank	0,30	0,42	0,58	0,73	0,81
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
c. Sewa Bangunan	1,31	1,36	1,38	1,39	1,41
d. Jasa Perusahaan	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
9. JASA - JASA	9,97	9,98	9,92	10,04	10,17
a. Pemerintahan Umum	7,71	7,70	7,60	7,69	7,77
b. Swasta	2,26	2,28	2,33	2,35	2,40
1. Sosial Kemasyarakatan	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19
2. Hiburan dan rekreasi	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27
3. Perorangan dan Rumahtangga	1,83	1,84	1,88	1,90	1,95
PDRB TANPA MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 7. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	199,53	242,92	309,82	372,69	447,67
a. Tanaman Bahan Makanan	125,81	142,72	149,76	155,24	167,53
b. Tanaman Perkebunan	260,66	330,51	445,04	550,56	662,95
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	134,09	152,63	174,08	201,73	238,65
d. Kehutanan	175,90	207,24	264,64	317,63	391,43
e. Perikanan	221,14	270,17	318,47	373,41	435,59
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	97,42	106,11	129,48	157,42	203,67
a. Minyak dan Gas Bumi	97,06	105,46	128,45	155,18	199,88
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	167,65	193,34	222,19	278,59	375,88
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	303,51	386,76	453,21	525,26	636,49
a. Industri Migas	86,77	106,50	105,97	120,91	151,99
b. Industri Tanpa Migas	456,15	584,15	697,76	810,03	977,71
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	207,03	232,34	266,30	298,28	344,80
a. Listrik	204,98	224,31	258,93	289,50	339,47
b. Air Bersih	216,01	267,50	298,57	336,71	368,12
5. BANGUNAN	188,80	214,64	236,22	290,12	479,79
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	162,86	208,48	256,97	314,84	396,08
a. Perdagangan Besar dan Eceran	160,46	200,75	246,42	301,63	381,23
b. Hotel	227,31	480,81	652,68	818,98	966,30
c. Restoran	238,86	384,64	471,81	574,30	683,78
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	163,87	196,67	230,71	275,38	329,92
a. Pengangkutan	144,96	172,78	201,67	239,93	287,42
1. Angkutan Darat	155,32	179,30	206,68	246,26	296,60
2. Angkutan Laut	150,34	168,54	200,31	239,80	287,65
3. Angkutan Udara	162,43	180,87	225,14	288,02	370,86
4. Jasa Penunjang Angkutan	212,96	346,15	409,34	466,18	525,40
b. Komunikasi	216,15	273,01	331,98	405,09	485,70
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	355,81	516,85	669,71	817,00	1.022,92
a. Bank	1.926,81	3.284,14	4.624,48	5.623,92	6.951,40
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	263,75	358,65	428,63	529,96	633,74
c. Sewa Bangunan	221,45	278,85	330,37	403,79	516,22
d. Jasa Perusahaan	193,08	236,62	281,11	343,58	457,67
9. JASA - JASA	155,51	186,65	215,66	260,98	302,94
a. Pemerintahan Umum	153,69	185,03	213,46	257,15	290,62
b. Swasta	161,84	192,32	223,33	274,33	345,94
1. Sosial Kemasyarakatan	160,22	197,43	234,26	278,56	341,86
2. Hiburan dan rekreasi	163,59	200,72	231,55	281,04	373,15
3. Perorangan dan Rumahtangga	161,73	190,59	221,09	272,93	342,26
PDRB TERMASUK MIGAS	139,81	164,20	199,81	240,12	301,83
PDRB TANPA MIGAS	230,67	287,35	352,09	422,23	521,18

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

TABEL 8. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2003-2007

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	119,62	128,00	136,66	144,82	151,83
a. Tanaman Bahan Makanan	109,60	113,37	116,13	118,56	121,56
b. Tanaman Perkebunan	121,35	130,16	142,76	156,44	167,46
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	115,54	121,38	130,09	139,26	149,68
d. Kehutanan	121,74	131,79	138,56	142,90	146,06
e. Perikanan	123,41	132,46	143,51	154,89	166,90
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	95,76	94,62	98,14	100,99	100,86
a. Minyak dan Gas Bumi	95,58	94,26	97,59	100,19	99,78
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	133,12	149,19	160,29	179,03	200,02
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	112,04	122,72	129,59	138,37	150,31
a. Industri Migas	84,31	91,22	89,17	89,98	90,95
b. Industri Tanpa Migas	131,56	144,90	158,05	172,45	192,12
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	120,48	133,06	145,30	153,81	162,46
a. Listrik	122,27	136,51	150,69	160,20	169,88
b. Air Bersih	112,64	117,95	121,69	125,86	129,96
5. BANGUNAN	128,94	140,67	150,73	163,20	182,22
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	131,88	144,24	158,88	176,82	192,63
a. Perdagangan Besar dan Eceran	131,87	144,23	158,85	176,84	192,61
b. Hotel	131,43	143,74	158,31	174,39	190,21
c. Restoran	133,40	145,47	161,57	178,00	196,42
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	137,40	153,68	169,76	186,09	199,64
a. Pengangkutan	124,25	137,97	150,75	163,15	172,12
1. Angkutan Darat	137,86	150,54	164,75	179,01	186,41
2. Angkutan Laut	124,41	137,55	144,63	152,34	163,30
3. Angkutan Udara	161,29	203,43	237,60	262,32	289,11
4. Jasa Penunjang Angkutan	135,83	160,20	177,96	193,99	212,36
b. Komunikasi	150,30	179,61	217,31	262,28	314,58
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	143,17	170,25	201,20	232,74	263,76
a. Bank	285,12	435,61	652,37	888,88	1.076,76
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	126,87	137,86	149,55	161,57	177,69
c. Sewa Bangunan	131,85	149,50	165,44	180,19	197,72
d. Jasa Perusahaan	131,34	147,01	161,46	174,74	197,17
9. JASA - JASA	124,88	136,19	146,98	161,59	177,28
a. Pemerintahan Umum	124,22	135,22	144,74	159,22	174,17
b. Swasta	127,18	139,59	154,81	169,85	188,15
1. Sosial Kemasyarakatan	130,93	148,77	163,11	177,83	194,19
2. Hiburan dan rekreasi	121,69	130,84	143,52	160,47	177,48
3. Perorangan dan Rumahtangga	127,65	140,05	155,73	170,52	189,19
PDRB TERMASUK MIGAS	105,03	108,11	113,96	119,83	123,91
PDRB TANPA MIGAS	126,14	137,51	149,26	162,17	175,55

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 9. INDEKS BERANTAI PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	130,77	121,74	127,54	120,29	120,12
a. Tanaman Bahan Makanan	106,75	113,45	104,93	103,66	107,92
b. Tanaman Perkebunan	152,16	126,80	134,65	123,71	120,41
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	109,84	113,83	114,05	115,89	118,30
d. Kehutanan	120,17	117,82	127,70	120,02	123,23
e. Perikanan	122,01	122,17	117,88	117,25	116,65
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	99,36	108,93	122,02	121,58	129,38
a. Minyak dan Gas Bumi	99,19	108,65	121,80	120,82	128,80
b. Pertambangan tanpa Migas	714,96	340,48	202,53	257,79	176,33
c. Penggalian	114,05	115,32	114,92	125,39	134,92
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	126,25	127,43	117,18	115,90	121,18
a. Industri Migas	93,63	122,73	99,51	114,09	125,70
b. Industri Tanpa Migas	132,43	128,06	119,45	116,09	120,70
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	134,50	112,22	114,62	112,01	115,59
a. Listrik	137,52	109,43	115,44	111,81	117,26
b. Air Bersih	123,25	123,84	111,61	112,77	109,33
5. BANGUNAN	120,72	113,68	110,06	122,82	165,38
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	120,60	128,01	123,26	122,52	125,80
a. Perdagangan Besar dan Eceran	119,98	125,11	122,75	122,41	126,39
b. Hotel	142,16	211,52	135,75	125,48	117,99
c. Restoran	127,77	161,03	122,66	121,72	119,06
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	117,16	120,01	117,31	119,36	119,81
a. Pengangkutan	116,78	119,19	116,72	118,97	119,79
1. Angkutan Darat	116,49	115,44	115,27	119,15	120,44
2. Angkutan Laut	111,45	112,11	118,85	119,71	119,96
3. Angkutan Udara	121,32	111,35	124,48	127,93	128,76
4. Jasa Penunjang Angkutan	128,45	162,54	118,26	113,88	112,70
b. Komunikasi	120,16	126,30	121,60	122,02	119,90
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	135,12	145,26	129,58	121,99	125,21
a. Bank	156,14	170,44	140,81	121,61	123,60
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	124,55	135,98	119,51	123,64	119,58
c. Sewa Bangunan	122,37	125,92	118,48	122,22	127,84
d. Jasa Perusahaan	128,26	122,55	118,80	122,22	133,21
9. JASA - JASA	111,92	120,03	115,54	121,02	116,08
a. Pemerintahan Umum	111,61	120,39	115,36	120,47	113,02
b. Swasta	112,95	118,84	116,12	122,83	126,10
1. Sosial Kemasyarakatan	115,85	123,22	118,65	118,91	122,73
2. Hiburan dan rekreasi	114,24	122,70	115,36	121,37	132,77
3. Perorangan dan Rumahtangga	112,50	117,85	116,00	123,45	125,40
PDRB TERMASUK MIGAS	112,37	117,45	121,68	120,18	125,70
PDRB TANPA MIGAS	127,62	124,57	122,53	119,92	123,43

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 10. INDEKS BERANTAI PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	106,32	107,00	106,77	105,97	104,84
a. Tanaman Bahan Makanan	103,01	103,44	102,43	102,10	102,53
b. Tanaman Perkebunan	107,11	107,25	109,68	109,58	107,04
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	104,52	105,05	107,17	107,06	107,48
d. Kehutanan	106,92	108,26	105,14	103,14	102,21
e. Perikanan	107,04	107,33	108,34	107,93	107,75
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	99,30	98,81	103,71	102,91	99,87
a. Minyak dan Gas Bumi	99,21	98,62	103,54	102,67	99,59
b. Pertambangan tanpa Migas	711,33	351,18	189,60	158,80	140,70
c. Penggalian	110,33	112,07	107,44	111,70	111,72
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	105,81	109,53	105,60	106,78	108,63
a. Industri Migas	97,77	108,20	97,76	100,91	101,07
b. Industri Tanpa Migas	109,89	110,14	109,08	109,11	111,41
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	103,10	110,44	109,20	105,86	105,62
a. Listrik	103,22	111,65	110,39	106,31	106,05
b. Air Bersih	102,56	104,72	103,18	103,43	103,25
5. BANGUNAN	106,34	109,10	107,15	108,27	111,65
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	110,81	109,37	110,15	111,29	108,94
a. Perdagangan Besar dan Eceran	110,86	109,38	110,13	111,33	108,92
b. Hotel	109,23	109,37	110,14	110,16	109,08
c. Restoran	109,38	109,05	111,07	110,17	110,35
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	111,20	111,85	110,46	109,62	107,28
a. Pengangkutan	110,82	111,04	109,26	108,23	105,50
1. Angkutan Darat	109,93	109,20	109,44	108,66	104,13
2. Angkutan Laut	109,15	110,56	105,15	105,33	107,19
3. Angkutan Udara	122,83	126,13	116,80	110,40	110,21
4. Jasa Penunjang Angkutan	115,23	117,94	111,08	109,01	109,47
b. Komunikasi	114,96	119,50	120,99	120,69	119,94
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	112,86	118,92	118,18	115,67	113,33
a. Bank	132,76	152,78	149,76	136,25	121,14
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	108,17	108,66	108,48	108,04	109,98
c. Sewa Bangunan	110,08	113,38	110,66	108,91	109,73
d. Jasa Perusahaan	109,93	111,93	109,82	108,23	112,84
9. JASA - JASA	106,87	109,06	107,92	109,94	109,71
a. Pemerintahan Umum	106,65	108,86	107,04	110,00	109,39
b. Swasta	107,66	109,76	110,90	109,72	110,77
1. Sosial Kemasyarakatan	109,67	113,62	109,64	109,03	109,20
2. Hiburan dan rekreasi	106,25	107,52	109,70	111,81	110,60
3. Perorangan dan Rumahtangga	107,67	109,71	111,20	109,50	110,95
PDRB TERMASUK MIGAS	102,45	102,93	105,41	105,15	103,41
PDRB TANPA MIGAS	108,17	109,01	108,54	108,66	108,25

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 11. INDEKS IMPLISIT PDRB PROVINSI RIAU
MENURUT LAPANGAN USAHA, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	166,80	189,78	226,71	257,35	294,84
a. Tanaman Bahan Makanan	114,79	125,89	128,96	130,94	137,82
b. Tanaman Perkebunan	214,79	253,93	311,74	351,93	395,89
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	116,05	125,75	133,82	144,86	159,44
d. Kehutanan	144,49	157,25	191,00	222,27	267,99
e. Perikanan	179,20	203,97	221,92	241,08	260,99
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	101,73	112,14	131,93	155,87	201,92
a. Minyak dan Gas Bumi	101,55	111,88	131,62	154,88	200,32
b. Pertambangan tanpa Migas	207,19	200,88	214,58	348,34	436,54
c. Penggalian	125,94	129,59	138,62	155,61	187,92
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	270,90	315,17	349,73	379,60	423,45
a. Industri Migas	102,93	116,75	118,84	134,37	167,11
b. Industri Tanpa Migas	346,71	403,13	441,47	469,72	508,91
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	171,85	174,61	183,28	193,92	212,23
a. Listrik	167,65	164,32	171,84	180,72	199,83
b. Air Bersih	191,78	226,80	245,35	267,52	283,27
5. BANGUNAN	146,43	152,58	156,71	177,77	263,30
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	123,49	144,54	161,74	178,06	205,61
a. Perdagangan Besar dan Eceran	121,68	139,19	155,13	170,57	197,93
b. Hotel	172,96	334,50	412,28	469,64	508,00
c. Restoran	179,05	264,42	292,02	322,65	348,13
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	119,27	127,97	135,91	147,98	165,26
a. Pengangkutan	116,67	125,23	133,78	147,07	166,99
1. Angkutan Darat	112,67	119,10	125,45	137,57	159,11
2. Angkutan Laut	120,85	122,53	138,50	157,40	176,15
3. Angkutan Udara	100,71	88,91	94,76	109,80	128,28
4. Jasa Penunjang Angkutan	156,78	216,07	230,02	240,31	247,41
b. Komunikasi	143,81	152,00	152,77	154,45	154,40
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	248,52	303,57	332,86	351,04	387,82
a. Bank	675,78	753,91	708,87	632,70	645,59
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	207,90	260,16	286,61	328,01	356,65
c. Sewa Bangunan	167,95	186,52	199,69	224,10	261,08
d. Jasa Perusahaan	147,01	160,95	174,11	196,62	232,12
9. JASA - JASA	124,53	137,05	146,72	161,51	170,88
a. Pemerintahan Umum	123,73	136,84	147,48	161,51	166,87
b. Swasta	127,26	137,78	144,26	161,51	183,86
1. Sosial Kemasyarakatan	122,37	132,71	143,62	156,65	176,05
2. Hiburan dan rekreasi	134,44	153,42	161,33	175,14	210,25
3. Perorangan dan Rumahtangga	126,70	136,09	141,97	160,06	180,91
PDRB TERMASUK MIGAS	133,11	151,89	175,34	200,39	243,58
PDRB TANPA MIGAS	182,86	208,96	235,90	260,36	296,89

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 12. PENDAPATAN REGIONAL TERMASUK MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	97.275.277,80	114.246.373,66	139.018.996,15	167.068.188,88	210.002.560,30
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	6.060.249,81	7.117.549,08	8.660.883,46	10.408.348,17	13.083.159,51
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	91.215.027,99	107.128.824,58	130.358.112,69	156.659.840,71	196.919.400,79
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	2.285.969,03	2.684.789,78	3.266.946,41	3.926.102,44	4.935.060,17
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	88.929.058,97	104.444.034,80	127.091.166,28	152.733.738,27	191.984.340,62
6. Penduduk Pertengahan Tahun	4.428.310	4.519.606	4.579.219	4.762.653	5.070.952
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	21.966.682,05	25.277.949,82	30.358.669,49	35.078.807,73	41.412.847,19
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	20.081.940,73	23.109.101,72	27.753.895,65	32.069.046,03	37.859.624,90

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

<http://riau.bps.go.id>

**TABEL 13. PENDAPATAN REGIONAL TERMASUK MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	73.077.959,49	75.216.719,28	79.287.586,75	83.370.867,24	86.213.259,46
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	4.552.756,88	4.686.001,61	4.939.616,65	5.194.005,03	5.371.086,06
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	68.525.202,62	70.530.717,67	74.347.970,10	78.176.862,21	80.842.173,40
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	1.717.332,05	1.767.592,90	1.863.258,29	1.959.215,38	2.026.011,60
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	66.807.870,57	68.763.124,76	72.484.711,81	76.217.646,83	78.816.161,80
6. Penduduk Pertengahan Tahun	4.428.310	4.519.606	4.579.219	4.762.653	5.070.952
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	16.502.448,90	16.642.317,78	17.314.652,73	17.505.131,54	17.001.395,29
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	15.086.538,79	15.214.406,91	15.829.055,52	16.003.191,25	15.542.675,58

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

<http://riau.bps.go.id>

**TABEL 14. PENDAPATAN REGIONAL TANPA MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	51.799.212,07	64.527.875,21	79.065.371,46	94.815.601,47	117.034.983,66
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	3.227.090,91	4.020.086,63	4.925.772,64	5.907.011,97	7.291.279,48
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	48.572.121,16	60.507.788,58	74.139.598,82	88.908.589,50	109.743.704,18
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	1.217.281,48	1.516.405,07	1.858.036,23	2.228.166,63	2.750.322,12
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	47.354.839,68	58.991.383,52	72.281.562,59	86.680.422,86	106.993.382,06
6. Penduduk Pertengahan Tahun	4.428.310	4.519.606	4.579.219	4.762.653	5.070.952
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	11.697.286,79	14.277.323,11	17.266.125,83	19.908.148,14	23.079.489,54
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	10.693.659,59	13.052.328,79	15.784.692,23	18.200.029,03	21.099.269,34

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

<http://riau.bps.go.id>

**TABEL 15. PENDAPATAN REGIONAL TANPA MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000, 2003-2007**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006*)	2007**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	28.326.774,11	30.879.767,77	33.516.541,66	36.417.633,12	39.420.760,09
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	1.764.758,03	1.923.809,53	2.088.080,55	2.268.818,54	2.455.913,35
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	26.562.016,09	28.955.958,23	31.428.461,12	34.148.814,58	36.964.846,74
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	665.679,19	725.674,54	787.638,73	855.814,38	926.387,86
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	25.896.336,90	28.230.283,69	30.640.822,39	33.293.000,20	36.038.458,88
6. Penduduk Pertengahan Tahun	4.428.310	4.519.606	4.579.219	4.762.653	5.070.952
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	6.396.745,96	6.832.402,60	7.319.270,31	7.646.501,46	7.773.838,15
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	5.847.905,16	6.246.182,45	6.691.276,92	6.990.431,63	7.106.842,83

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

<http://riau.bps.go.id>